

HAJI AGUS SALIM

Karya dan Pengabdianya



Oleh Mukayat

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

HAJI AGUS SALIM

Karya dan Pengabdianannya

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA

Nomor Induk : 9253

Tanggal : '20 DEC 2010

Oleh Mukayat

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

HALI AGUS SALIM

Karya dan Pengabdian

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta.

Penyunting

1. Sutrisno Kutoyo
2. M. Soenjata Kartadarmadja

Copyright © 2000
All rights reserved.
No part of this publication
may be reproduced, stored in
a retrieval system, or
transmitted, in any form or
by any means, electronic,
mechanical, photocopying,
recording, or by any
information storage and
retrieval system, without
permission in writing from
the copyright owner.

**COPYRIGHT PADA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

**CETAKAN I TAHUN 1981
CETAKAN II TAHUN 1985**

COPY RIGHT PADA
PROPOSAL INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
INSTRUKSI SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

CETAKAN I TAHUN 1981
CETAKAN II TAHUN 1982

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapakan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diper-

lukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Desember 1981.
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional yang juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta manfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Desember 1981

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), maka pada tahun anggaran 1985/1986 Proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1985

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Mengingat besarnya perhatian serta banyakya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (PIDSN) maka pada tahun anggaran 1985/1986 Proyek melaksanakan pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah terbit sebelumnya.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Jakarta, Mei 1985

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

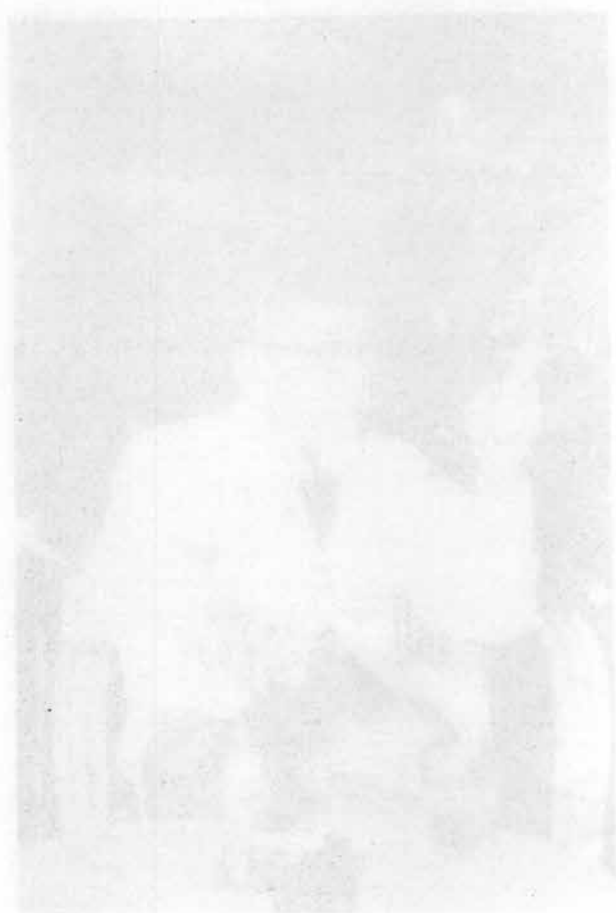
DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Kata Pengantar	v
Kata Pengantar Cetakan ke II	iii
Daftar Isi	ix
Bab I <i>Masa Kanak-kanak dari Masa Sekolah</i>	1
1.1. Lingkungan Alam	1
1.2. Masa Sekolah.	3
1.3. Gemar Membaca	5
Bab II <i>Mencari Asas Hidup</i>	8
2.1. Merantau ke Negeri Arab.	8
2.2. Kembali ke Tanah Air.	11
2.3. Mendirikan Sekolah Swasta.	12
Bab III <i>Membina Keluarga dan Pendidikan</i>	14
3.1. Hubungan Keluarga.	14
3.2. Pendidikan Keluarga	16
Bab IV <i>Merintis Jenjang Kemajuan</i>	22
4.1. Karier Dalam Bidang Pers	22
4.2. Karier Dalam Bidang Politik	25
Bab V <i>Haji Agus Salim dan Perkembangan SI</i>	34
5.1. Perpecahan Dalam Sarekat Islam.	34
5.2. Menghimpun Persatuan di Kalangan Umat Islam.	38

5.3. Sebagai Anggota Volksraad	41
5.4. Membina Perhimpunan Karyawan	46
5.5. Sebagai Pemimpin Surat Kabar dan Pembina Organisasi Pemuda	49
Bab VI <i>Perjuangan Menjelang Kemerdekaan</i>	54
6.1. Peristiwa pada Akhir Pemerintahan Kolonial Belanda	54
6.2. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945	59
6.3. Peranan Haji Agus Salim Dalam Jakarta Charter	63
Bab VII <i>Pengabdian Semasa Pemerintahan Republik Indonesia</i>	67
7.1. Haji Agus Salim Terjun Dalam Pemerintahan	67
7.2. Perpecahan di dalam PSII dan Masyumi	76
7.3. Perundingan Konperensi Meja Bundar	79
Bab VIII <i>Pengabdian di Hari Tua</i>	85
DAFTAR PUSTAKA	91



Haji Agus Salim
(The Grand Old Man of Indonesia)



Mr. Agus Salim
(The Grand Old Man of Indonesia)

BAB I MASA KANAK-KANAK DAN MASA SEKOLAH

1.1 *Lingkungan Alam*

Di Indonesia banyak tempat yang indah dan menarik. Saja yang baru dikenal hingga saat ini terutama hanya pulau Bali saja. Sebenarnya di daerah Nusantara ini tak terkira jumlah tempat-tempat yang mengesankan. Salah satu di antaranya ialah keindahan alam Minangkabau. di wilayah ini terdapat sebuah lembah yang terkenal dengan nama Ngarai Sianok, yaitu sebuah ngarai yang indah dengan hawanya yang sejuk nyaman. Karena itu tidaklah mengherankan kalau mendapatkan julukan *Grand Canon of Indonesia*.

Minangkabau yang terletak di propinsi Sumatra Barat merupakan salah satu contoh keragaman daerah Indonesia yang memiliki adat istiadat kuat serta ciri-ciri kebudayaan tertentu, yang mempengaruhi alam pikiran serta tatanan hidup masyarakatnya. Salah satu nagari atau desa yang berada di lembah itu ialah Kota Gadang yang termasuk Kabupaten Agam dengan ibukota Bukit Tinggi.

Dari nagari ini persada bumi Indonesia banyak memperoleh kaum cendekiawan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Sudah barang tentu kehadiran para cendekiawan itu selain disebabkan karena adanya bibit-bibit unggul, juga karena dorong-

an sikap masyarakatnya. Sikap yang menonjol antara lain ialah ketaatan kepada Agama serta sifat gotong royong dan musyawarah. Kegotong-royongan ini antara lain diwujudkan dengan sikap ingin membantu dengan berbagai dana bagi pelajar yang cerdas, namun kurang mampu. Walaupun masyarakat berada di bawah naungan agama yang ketat dan adat yang mengikat, tetapi hadirnya para terpelajar tadi membuka alam fikiran masyarakat serta menjadi tuntutan ke arah kehidupan yang lebih maju.

Salah seorang cendekiawan yang lahir dari daerah ini ialah Mashudul Haq yang kemudian terkenal dengan nama Haji Agus Salim; dilahirkan di bawah naungan bintang Libra tepat pada tanggal 8 Oktober 1884 di kota Gadang, IV Bukittinggi. Ia dilahirkan di kalangan keluarga pegawai pemerintah. Betapa tidak, sebab baik ayah maupun kakaknya adalah pegawai pemerintah Belanda. Ayahnya sebagai seorang bumiputera, tapi pada waktu itu telah memegang jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai seorang Jaksa Kepala di Riau. Sutan Mohammad Salim demikianlah nama ayahnya, dan Siti Zaenah ibunya merupakan keluarga yang terpandang, sehingga karena status sosialnya itu, maka terbukalah bagi Agus Salim untuk mengikuti pendidikan sekolah yang seluas-luasnya.

Pergantian nama dari Mashudul Haq menjadi Agus Salim mengundang riwayat serta menunjukkan keteguhan watak yang tersendiri. Nama Agus Salim berasal dari pengasuhnya yang berasal dari suku Jawa yang selalu memanggil anak asuhannya dengan sebutan "Gus" yang berarti anak yang bagus. Ternyata nama panggilan itu menjadi populer di sekolahnya, sedangkan Salim berasal dari nama ayahnya. Pada waktu itu penonjolan nama menurut garis keturunan ayah belum lazim dan bertentangan dengan adat. Di Minangkabau masih berlaku hukum garis keturunan melalui garis ibu, karenanya penggunaan sebutan dari pihak ayah merupakan bukti keteguhan hati dan keberaniannya menentang arus adat. Hal ini bukanlah persoalan yang gampang,

sebab kesemuanya itu memerlukan tindakan yang ulet, sabar dan berani.

1.2 Masa Sekolah

Setelah mencapai umur sekolah atau yang biasa yaitu umur tujuh tahun, Agus Salim mulai menempuh masa pendidikan di sekolah dasar yang dulu disebut *Europeesche Lagere School* (ELS). Kedudukan orang tuanya sebagai *ambtënaar* maupun sebagai bangsawan tinggi memudahkan proses pemasukan sekolah. Selama menempuh pelajaran di sekolah dasar itu dia tidak mengalami kesulitan sama sekali, sehingga jenjang waktu yang ditentukan dilalui dengan lancar dan tamat pada tahun 1898. Ia rajin belajar baik di sekolah maupun di tempat pengajian. Pagi hari ia mengikuti pelajaran di sekolah, sedangkan malam harinya sebagaimana anak-anak kampung yang lain ia giat belajar tentang agama Islam yang mengaji di surau, sehingga walaupun anak "priyayi" ia tidak terlepas dari lingkungannya.

Semenjak kecil Agus Salim gemar sekali membaca buku terutama yang berisi pengetahuan. Agaknya dia menyadari, bahwa pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah saja tidak cukup karena itu perlulah diperluas dengan banyak membaca yang kesemuanya ini tidaklah mengherankan kalau Agus Salim berpengetahuan luas, yang amat berguna bagi kemajuannya kelak. Setelah tamat dari ELS dengan hasil yang baik ia berkemauan untuk melanjutkan studi. Kehendaknya itu disambut dengan hangat oleh orang tuanya yang kemudian mengirimkannya ke Batavia (Jakarta) untuk masuk ke sekolah menengah *Hogere Burger School* (HBS) selama lima tahun. Mengapa ia terpaksa dikirim ke Batavia? Karena di Bukittinggi pada waktu itu belum ada HBS. Perpisahan dengan orang tuanya menuju ke Batavia itu merupakan perjalanan pertama dalam rangkaian perantauan Agus Salim. Selama belajar di Batavia hasilnya tidak mengecewakan dan pada waktu ujian akhir ia mendapat angka yang terbaik. Keadaan yang demikian itu sangat menarik perhatian sehingga dari para gurunya ada usaha untuk mengusahakan bea-

siswa bagi Agus Salim guna melanjutkan ke sekolah kedokteran yaitu *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (Stovia). Namun usaha terpuji tersebut mengalami kegagalan. Ketenaran Agus Salim juga menarik Raden Ajeng Kartini yang pada waktu itu mendapat tawaran beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk meneruskan studi ke Nederland (Negeri Belanda). Ketika terbayang oleh Raden Ajeng Kartini hal itu tidak mungkin, mengingat bahwa dia sudah sampai pada tarap hidup berumah tangga maka dikemukakan saran supaya beasiswa itu diberikan kepada pelajar yang berprestasi cemerlang yaitu Agus Salim. Tetapi Agus Salim menolaknya karena ia berpendirian bahwa kalau pemerintah Belanda mengirimkannya ke Nederland karena desakan Kartini dan bukan karena niat baik pemerintah Belanda sendiri, maka lebih baik tidak berangkat. Hal ini menunjukkan sikapnya yang berkepribadian teguh. Selama di sekolah dan dalam pergaulan dengan teman-temannya, Agus Salim menunjukkan sifat-sifat yang baik, otak yang cerdas, pandangan yang luas serta kemauan yang keras. Sifat inilah yang kemudian mendasarinya menjadi seorang pemimpin berbakat dan berpengetahuan luas. Walaupun ia berperawakan kecil, namun suka berolahraga. Olah raga memang merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan sifat sportif, berani serta menyingkirkan rasa rendah diri.

Agus Salim memandang teman-temannya di sekolah berkedudukan sama, baik mereka dari kalangan bumiputera, dari golongan Asia lain maupun dari golongan kulit putih. Ia tidak merasa rendah diri terhadap anak-anak Belanda. Pada zaman penjajahan di sekolah-sekolah yang disediakan khusus untuk anak-anak Belanda sangat menonjol. Karena itu tidak mengherankan bila kerap kali Agus Salim bersaing dengan mereka. Dia dapat membuktikan bahwa anak-anak bangsa kulit berwarna dapat menyamai bahkan mengalahkan prestasi anak-anak Belanda. Kepandaian dan kecerdasan bukanlah monopoli anak-anak kulit putih, tetapi juga milik anak-anak *inlander* asal semuanya diberi kesempatan yang sama. Kebodohan yang dide-

rita oleh bangsa yang terjajah bukan karena mereka itu tumpul otaknya, tetapi karena tidak adanya kesempatan yang sama.

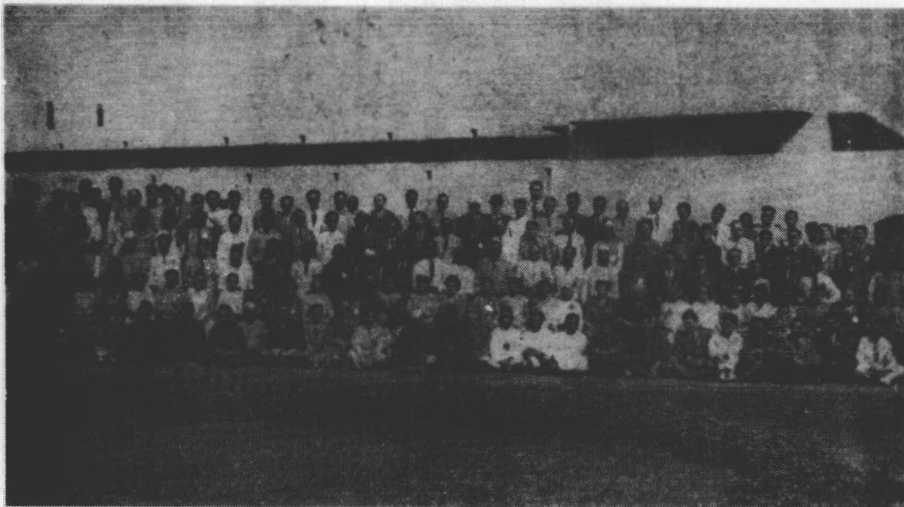
1.3 *Gemar Membaca*

Agus Salim memang dikaruniai otak yang cemerlang. Salah satu keistimewaannya ialah kemampuannya mengerti dan mempergunakan pelbagai bahasa Asing. Dengan tekun ia memperdalam pengetahuannya dalam bahasa Asing sehingga secara aktif dapat berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Arab, Turki di samping bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda dan lain-lain. Tidaklah sukar baginya berbicara dengan mempergunakan berbagai bahasa dalam waktu yang sama. Pengetahuan yang luas dalam bahasa ini sangat menunjang kegemarannya membaca dan ini sesuai sekali dengan semboyannya bahwa bahasa merupakan kunci ilmu pengetahuan.

Kedaaan dan sejarah bangsa tidak luput dari tinjauannya. Setelah selesai mempelajari berbagai buku sejarah Indonesia ia tertarik pada persoalan perjuangan bangsa. Dibacanya buku-buku tentang Teuku Umar, Diponegoro dan Hasanuddin yang menentang penjajahan. Kesan yang diperolehnya ialah mengapa para pahlawan itu selalu gagal dalam menghadapi Belanda. Kegagalan yang dialami para pejuang secara beruntun itu menimbulkan perasaan iba dan prihatin terhadap nasib bangsanya. Ditelusurinya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan itu dan timbullah niat untuk menumbuhkan semangat baru, yaitu keinginan kuat bersama-sama para pemimpin yang lain berusaha membebaskan bangsa dan negaranya dari belenggu penjajahan. Karena itu ia berteguh hati untuk tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Nyatalah bahwa semangat Nasionalisme telah tumbuh di dadanya.

Agus Salim mengikuti pendidikan formal memang tidak lama hanya sampai pada sekolah menengah (HBS) saja. Ia tidak melanjutkan ke sekolah kedokteran (Stovia) maupun ke negeri

Belanda. Putusnya sekolah resmi ini tidaklah berarti bahwa ia berhenti belajar. Ia tekun belajar terus dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan maupun agama dari pelbagai sarjana Barat dan sarjana-sarjana islam. Ia terus menerus sepanjang hidupnya belajar, benar-benar ia seorang *self made man* yang berhasil. Usaha mengarungi samudra kehidupannya merupakan gambaran watak yang menunjukkan keuletan dan ketabahan hatinya.



7

Haji Agus Salim beserta para peserta Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tahun 1947.

BAB II Mencari Asas Hidup

2.1 Merantau ke Negeri Arab

Setelah menyelesaikan pelajaran di *Hogere Burger School* pada tahun 1903 dengan hasil yang cemerlang, Agus Salim memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya dan mulai bertekad untuk bekerja. Sesuai dengan kemampuan bahasa yang dimilikinya dengan mudah ia diterima sebagai tenaga penterjemah di Jakarta. Ia menterjemahkan naskah dari bahasa Asing dalam bahasa Melayu (istilah bahasa Indonesia pada waktu itu). Pekerjaan ini dilakukan tidak lama, sebab kemudian ia pindah ke Riau tempat di mana ayahnya bekerja dan mendapat pekerjaan sebagai pembantu notaris. Di sini pun rupanya ia tidak puas dengan pekerjaan yang dihadapi dan dalam waktu singkat Agus Salim pindah ke Indragiri bekerja pada perusahaan batu bara sampai tahun 1906.

Pemilihan tempat kerja di swasta dan selalu berpindah pekerjaan itu sangat merisaukan hati orang tuanya. Sebagai orang tua dan termasuk *ambtenaar* serta berasal dari golongan bangsawan (*mas urai*, menurut sebutan Minangkabau), sangat mendambakan putra-putranya mengikuti jejaknya. Kegoncangan inilah yang merupakan salah satu sebab ibunya menderita sakit yang kemudian berakhir dengan meninggal dunia pada tahun

1906. Peristiwa kematian ibu yang sangat dicintainya itu mempengaruhi jalan pikirannya. Pada tahun 1906 itu juga ia berangkat ke Jeddah untuk bekerja pada Konsulat Belanda, suatu pekerjaan yang semula ditolakny.

Ia memangku jabatan sebagai sekretaris Drageman pada Konsulat Belanda Jeddah, Arabia dari tahun 1906—1911. Setiap pekerjaan yang diserahkan kepadanya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sehingga tak mengecewakan pimpinan. Pada waktu inilah untuk pertama kalinya dia menulis sebuah risalah yaitu risalah mengenai astronomi.

Selama lima tahun di Negeri Arab itu Agus Salim berusaha untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebanyak mungkin. Ia tidak hanya bekerja di kantor konsulat melainkan juga terus belajar. Keistimewaannya dalam mempelajari bahasa, menyebabkan ia dalam waktu yang singkat telah mampu menguasai bahasa Arab. Ini kemudian menjadi sarana yang tidak ternilai untuk memperdalam pengetahuan agama. Tujuan Agus Salim ke Arab tidak hanya mencari uang semata-mata, tetapi juga ingin memperdalam pengetahuan agama. Karena itu kesempatan tersebut dipergunakan benar-benar.

Sebelum Agus Salim sampai di Arab ternyata pamannya yang bernama Ahmad Khatib telah bermukim di Mekah. Sang paman ini telah menjadi ulama besar, hal ini dapat diketahui dari tugasnya sebagai seorang guru pada Masjidil Haram di Mekah. Ulama ini mempunyai hubungan yang erat dengan Haji Ahmad Dahlan salah seorang pembaharu Islam di Indonesia yang pada tanggal 10 Nopember 1912 di Yogyakarta mendirikan Muhammadiyah suatu perkumpulan sosial religius yang menginginkan modernisasi dalam tubuh agama Islam. Cara yang ditempuh oleh Haji Ahmad Dahlan ialah dengan mendirikan dan memelihara sekolah, balai kesehatan, rumah yatim piatu, masjid, surau serta memperbincangkan berbagai persoalan agama Islam secara mendalam.

Persahabatan yang terjalin erat antara Agus Salim dengan

Ahmad Khatib mendorong ia lebih tekun lagi mempelajari karya-karya pemikir Islam modern. Ia giat mempelajari buku-buku Jamalludin Al Afghani (1838 – 1897), yang memancarkan ide Pan Islamisme, serta Mohamad Abduh (1849 – 1905) pujangga Islam yang menginginkan reformasi dan modernisasi dalam agama Islam. Perintis Islam modern ini sangat berpengaruh di dunia Islam. Agus Salim berpendapat bahwa keadaan pendidikan Islam di Indonesia sangat memprihatinkan, dan harus diperbaharui karena sudah ketinggalan jaman. Agama Islam yang merupakan agama kemajuan itu diterima keliru oleh masyarakat terutama disebabkan karena kesalahan informasi dari pemerintah kolonial Belanda. Tekad inilah yang menyebabkan Agus Salim terjun ke dalam bidang dakwah dan berkemauan keras untuk membawa agama Islam ke arah kemajuan. Kesempatan di Arab itu dipergunakan Agus Salim dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu dengan melaksanakan ibadah Haji.

Selama bekerja pada konsulat itu ia dapat membuktikan dirinya sebagai seorang yang cerdas, tangkas dan kritis. Pekerjaan yang diserahkan kepadanya selalu beres, sehingga ia mendapat penghargaan sebagai pembantu yang berjasa. Dalam suatu peristiwa yang melibatkan antara dia dengan konsulnya suatu perdebatan, antara lain sang pemimpin ini menyindir dengan mengatakan, "Salim apakah engkau mengira bahwa engkau orang yang paling pintar di dunia ini?"

Dengan jitu pertanyaan itu dijawabnya bahwa pernyataan itu tidak benar sama sekali. Diakuinya banyak orang yang lebih pintar dari padanya hanya siapa di antara mereka itu sampai kini ia belum ketemu.

Selain mempelajari tata niaga dan perdagangan yang memang menjadi tanggungjawab konsulat, maka ia juga tekun mengikuti tatacara kehidupan diplomatik. Pengetahuannya tentang hal ini nanti akan sangat berguna dan menjadi dasar bagi perkembangan kariernya pada waktu periode kemerdekaan Indonesia telah tercapai.

Sebagai lazimnya seorang pemuda yang menginjak masa dewasa, maka pada waktu itu ia terpicat oleh seorang gadis Arab. Hubungannya yang semakin hari semakin erat itu ternyata juga tidak bertepuk sebelah tangan, sehingga kedua insan itu menjalin tata kehidupan yang lebih tinggi yaitu meningkat pada taraf perkawinan.

2.2 *Kembali ke Tanah Air*

Pergolakan jiwa pemuda Salim akan kemajuan agama serta kerinduan akan keindahan tanah air menyebabkan ia tidak tahan untuk lebih lama lagi berdiam di luar negeri. Ketetapan ini pun nanti ternyata pula dari nasehatnya kepada pemuda Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) yang ingin terus bermukim di Mekah. Haji Agus Salim berkesimpulan bahwa kalau terlalu lama di luar negeri maka akan lebih sulit untuk menyesuaikan diri bila nanti kembali ke tanah air. Sebenarnya di tanah air lah tempatnya untuk mencari ilmu dan membina diri untuk mengabdikan kepada bangsa, nusa dan agama. Atas dasar pemikiran inilah maka ia pada tahun 1911 memutuskan untuk kembali ke tanah air. Sayang sekali bahwa usahanya membina keluarga yang bahagia itu putus disebabkan oleh ketidak-sanggupan istrinya untuk meninggalkan orang tua dan kampung halamannya guna mengikuti langkah suami. Akibatnya kedua suami isteri itu terpaksa harus bercerai, suatu perbuatan halal namun yang paling dikutuk oleh Tuhan. Agus Salim kembali ke tanah air tanpa isteri.

Dengan menumpang kapal laut yang perjalanannya memakan waktu tiga bulan Haji Agus Salim sampai dengan selamat di Hindia Belanda (nama Indonesia pada waktu itu belum ada). Ia tidak langsung ke Bukittinggi tetapi terus menetap di Jakarta. Ia kemudian bekerja pada *Departement Onderwijs en Feredienst* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan zaman penjajahan Belanda) dan lalu mendapat pekerjaan pada *Burgelijke Openbare Werken* (Jawatan Pekerjaan Umum) dari tahun 1911 sampai 1912. Hanya dalam waktu satu tahun ia bekerja pada kantor

tersebut dan kemudian minta berhenti untuk berpindah ke pekerjaan lain.

Jiwa Haji Agus Salim memang selalu gelisah, tidak puas pada keadaan di tanah air yang dialaminya. Perantauan di luar negeri selama lima tahun benar-benar menambah pengetahuan dan mematangkan jiwanya. Dengan membaca pelbagai buku ilmu pengetahuan dan menelaah perjuangan bangsanya dan situasi internasional pada waktu itu, ia tertarik pada usaha untuk mencerdaskan bangsa, karena itu kemudian ia terjun ke dunia pendidikan.

2.3 *Mendirikan Sekolah Swasta*

Untuk merintis tujuan ini ia berniat kembali ke kampung halamannya. Usahnya dimulai dari bawah dengan membina sekolah di negerinya. Ia kembali pada dunia swasta dengan mendirikan *Hollands Inlandse School* (HIS), yaitu sebuah sekolah dasar untuk anak-anak bumiputra.

Keistimewaan sekolah ini ialah mulai ditanamkannya pendidikan kebangsaan dengan tujuan supaya anak-anak tidak lagi merasa rendah diri. Dalam alam pendidikan kolonial memang pendidikan kebangsaan tidak disinggung-singgung. Bahkan selalu ditanamkan bahwa penduduk bumiputra (*inlander*) adalah orang yang pasrah, tidak mempunyai kemampuan bekerja dan kecerdasan otak. Gambaran pemerintah kolonial terhadap orang bumiputera sangat rendah inilah yang menimbulkan perasaan rendah diri pada kaum bumiputera dan perasaan semacam itu harus dikikis habis melalui pendidikan. Memang sarana yang dipilih ini tepat sekali.

Setelah satu tahun menetap di Kota Gadang, Agus Salim mulai terpikat pada seorang gadis yang bernama Zaenatun Nahr. Gadis ini masih saudara sepupunya melalui garis ayah. Dalam waktu yang singkat dilangsungkan pernikahan dan kedua insan ini berhasil membina keluarga yang rukun dan bahagia, meskipun dalam melalui liku-liku hidup yang heroik itu keluar-

ga Haji Agus Salim hidup dengan melarat. Kekurangan yang bersifat lahiriah namun batiniah sangatlah tentram.

Sekolah yang dikelolanya berjalan baik sekali. Ia merasa mampu untuk mengajar namun secara resmi ia belum mempunyai ijazah guru. Karena itu ia berusaha untuk mengikuti Ujian *hulpacte* (akte guru) yang diselenggarakan setiap tahun. Ia mempelajari Ilmu Jiwa dan Ilmu Pendidikan dan semua vak yang akan diujikan sebaik-baiknya. Ia yakin akan dapat menempuh ujian dengan hasil yang tidak mengecewakan. Tetapi ternyata bahwa dalam ujian itu ia terpaksa tidak lulus karena jatuh pada vak yang paling dikuasainya yaitu bahasa Belanda. Kiranya hal ini disebabkan karena adanya soal diskriminasi kolonial. Hal ini terbukti dari ucapan Bermeyer delapan tahun kemudian pada waktu wakil *zending* ini mendengarkan pidato Haji Agus Salim di Volksraad. Ia mengakui bahwa bahasa Belanda Agus Salim bagus sekali dan tidak banyak orang Belanda yang pandai berbahasa Belanda seperti itu. Karena itu kalau Haji Agus Salim tidak berhasil mendapatkan *hulpacte* karena tidak lulus bahasa Belanda adalah suatu hal yang keterlaluan.

Dengan gagalnya untuk mendapatkan diploma guru tersebut, Haji Agus Salim sekeluarga berniat untuk mengarangki kehidupan baru. Suasana kota kecil di kaki Gunung Singgalang yang tenang serta nyaman terpaksa ditinggalkan dan dengan menumpang kapal layar menuju ke Pulau Jawa. Tempat yang mula-mula ditujunya ialah Bogor kemudian pindah ke Jakarta. Di sinilah ia mulai menyusun tekad dan semangat baru yaitu berkecimpung dalam dunia pers dan politik. Di samping terus berusaha membina keluarga yang bahagia.

BAB III

BAB III MEMBINA KELUARGA DAN PENDIDIKAN

3.1 *Hubungan Keluarga*

Setelah kembali dari Jeddah, Haji Agus Salim tidak langsung menuju ke kampung halamannya melainkan menetap lebih dahulu di Jakarta. Setelah pindah pekerjaan di pelbagai tempat ia kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia kemudian kembali pulang ke Kota Gadang. Dirintisnya dari bawah dengan mendirikan *Hollands Inlandse School* (Sekolah Dasar Bumi Putera) yang berstatus swasta. Sambutan masyarakat sangat menggembirakan dan nama Haji Agus Salim semakin menanjak.

Di samping mengelola sekolah tersebut, ternyata setelah kurang lebih satu tahun berada di desa itu tertambatlah hatinya pada seorang gadis yang bernama Zaenatun Nahar. Hal ini tidak mendapat rintangan dari orang tuanya, bahkan diharapkan, karena gadis itu ternyata masih kemenakan ayahnya. Namun sebelum mendapat keputusan yang pasti, Haji Agus Salim belum lega hatinya, sehingga untuk itu terlebih dahulu ia meminta agar dapat menemui calon isterinya sendiri, suatu hal yang pada waktu ini dianggap janggal.

Setelah tercapai kesepakatan dan tiadanya paksaan maka perhubungan ini akhirnya dikukuhkan dengan suatu pesta per-

nikahan pada tanggal 12 Agustus 1912. Gadis Zaenatun Nahar yang kemudian menjadi nyonya Haji Agus Salim dilahirkan di Kota Gadang pada tanggal 16 Desember 1893.

Di dalam membina perkawinan yang berbahagia itu beliau dikaruniai keluarga besar dengan sepuluh orang anak. Di antaranya ada yang meninggal pada waktu masih kecil, dua orang jumlahnya. Ke delapan putranya itu terdiri dari empat orang laki-laki dan empat orang perempuan, yaitu:

1. Theodora Atia, lahir pada tanggal 26 Juli 1913 yang kini menjadi nyonya Mr. Soedjono Hardjosoediro.
2. Yusuf Taufik, lahir pada tanggal 8 September 1915.
3. Violet Hanifah, lahir pada tanggal 30 Juli 1917, kini menjadi isteri Djohan Syahruczah.
4. Maria Zenobia, lahir pada tanggal 1 Desember 1919, isteri dari Drs. Hazil.
5. Ahmad Syauket, lahir pada tanggal 14 Desember 1921, gugur semasa revolusi fisik tahun 1946, disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Tangerang.
6. Imam Basri, lahir pada tanggal 14 Juli 1924, bekas atase militer Republik Indonesia di RRC.
7. Siti Asiah, lahir pada tanggal 22 Nopember 1928 isteri dari Sunharjo.
8. Mansyur Abdul Rahman Sidik, lahir pada tanggal 28 September 1939.

Peristiwa kematian anaknya dapat memberikan gambaran kesederhanaan dan kemiskinannya. Pada waktu itu ia tidak mampu membeli kain kafan, karena tidak tersedia uang. Maka dengan ketetapan hati ia mengambil taplak meja dan kain kelambu untuk membungkus jenazah setelah dicuci dan dijemur sampai kering. Dengan halus dan pasti ditolaknyanya rekan yang membawa kain kafan baru dengan mengatakan bahwa untuk yang meninggal cukup kain bekas sedangkan yang baru lebih baik dipakai oleh yang masih hidup. Selagi hidup manusia membutuhkan pertolongan namun sesudah mati tidak lagi memerlukannya.

Pada waktu putranya yang pertama lahir ternyata kelihatan amat kecil dan lemah. Haji Agus Salim khawatir apakah hal ini disebabkan karena adanya perkawinan keluarga yang terjadi di antara kerabat dekat. Dari hasil membaca buku-buku tentang perkawinan semacam itu ia mendapatkan keterangan bahwa akibat buruk dari keturunan ini dapat dikurangi dengan menghentikan kebiasaan makan daging. Karena itu diputuskan untuk menghilangkan kegemaran makan daging. Bagi ibu Haji Agus Salim ini pun dirasakan berat sebab dia harus dapat menciptakan menu yang tetap segar, bergizi tanpa hadirnya daging. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, sehingga harus berusaha dan mencoba membuat resep-resep baru. Akhirnya ibu ini bangga karena dapat membuat rendang dari nangka muda maupun gulai otak dan tahu. Dalam usaha membina keturunan yang sehat Haji Agus Salim memberi kebebasan putra-putrinya untuk memilih jodoh.

Adat perkawinan antara keluarga ditinggalkan jauh-jauh. Empat di antara putra-putranya kawin dengan orang Jawa, yang seorang mendapatkan gadis Bali sedang yang dua orang memilih jodoh dengan orang sekampung. Hubungan Haji Agus Salim baik sebagai suami isteri maupun antara orang tua dan anak terjalin erat dan harmonis, suatu cermin keluarga bahagia.

3.2 Pendidikan Keluarga

Suatu keunikan dalam membina keluarga ialah bahwa Haji Agus Salim telah memutuskan untuk menyelenggarakan pendidikan putra-putranya langsung ditangani sendiri. Pendidikan dilaksanakan di dalam keluarga dan tidak mengirimkan putra-putranya ke sekolah negeri, kecuali putranya yang bungsu yaitu Sidik Salim yang bersekolah sewaktu Indonesia sudah merdeka.

Ia menyadari betapa lebarnya jurang perbedaan antara pendidikan kolonial dan pendidikan yang bersifat nasional. Perwujudan idaman hati terhadap pendidikan yang bersifat nasional pertama-tama dituangkan dalam bentuk pendidikan keluarga itu. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Haji Agus Salim dengan

mendirikan Sekolah Dasar Bumiputera di kampung halamannya sendiri. Sikap yang demikian membuktikan keteguhan pendirinya.

Walaupun waktu itu sedang menggelora tuntutan kaum etnis agar supaya pemerintah kolonial memperhatikan nasib bangsa yang dijajah dan meningkatkan kecerdasannya, rakyat jajahan, namun Haji Agus Salim tetap berpendapat, bahwa tidak ada pemerintah kolonial yang menjalankan pendidikan di tanah jajahan secara ikhlas dan murni. Itu semua akan dilaksanakan atas dasar kepentingan si penjajah (*utiliteits onderwijs*).

Wujud dari pendidikan kolonial pada hakekatnya ialah mencetak tenaga-tenaga kasar dan menengah, untuk memenuhi kebutuhan pegawai-pegawai pabrik (*onderneming*) serta menciptakan semangat budak. Untuk dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dikenakan syarat-syarat yang beraneka ragam, sejak dari segi keturunan sampai status sosial dari orang tuanya. Diusahakan agar anak pribumi yang dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi sesedikit mungkin dan dijaga jangan sampai diantara mereka timbul perasaan nasional. Pemerintah kolonial sadar bahwa motot yang menggerakkan roda pergerakan nasional lahir dari kaum cendekiawan ini. Karena itu dengan pelbagai usaha ditekan perasaan yang demikian bahkan kalau mungkin dipadamkan.

Keadaan geografis serta beraneka ragamnya suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara juga menjadi pertimbangan kebijaksanaan pendidikan nasional. Karena itu tidak mengherankan kalau pemerintah Belanda menciptakan cara-cara pendidikan yang menimbulkan rasa antipati antar suku dan golongan yang menimbulkan rasa antipati antar suku dan golongan. Di hadapan masyarakat atau suku Sumatra misalnya, pemerintah selalu memuji bahwa suku Sumatra misalnya, pemerintah selalu memuji bahwa suku Sumatra adalah suku yang pemberani dan tegas, sedangkan orang Jawa dikatakan sebagai orang yang berjiwa budak. Namun apabila di hadapan suku Jawa mereka pun berkata lain dengan memuji-muji sifat-

sifat suku Jawa sebagai yang penuh toleransi, dan halus sedangkan suku-suku Sumatra digambarkan sebagai orang yang brutal.

Demikianlah pendidikan dilaksanakan untuk menunjang kepentingan pemerintah kolonial, serta melanggengkan penjajahan di bumi Nusantara ini. Ditanamkanlah rasa rendah diri serta ditumbuhkan dasar-dasar perpecahan atau politik adu domba di antara suku bangsa di kepulauan ini.

Selama orientasi pendidikan masih bertumpu kepada kepentingan penjajah, maka Haji Agus Salim tidak rela serta tidak sampai hati mengirimkan putra-putranya ke sekolah kolonial. Hanya yang bungsu yang masa sekolahnya sudah menginjak jaman merdeka sehingga tujuan pendidikan sudah berorientasi pada kepentingan nasional maka anaknya tersebut tadi dikirimkan ke sekolah negeri.

Pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga Haji Agus Salim berjalan secara bebas, disiplin serta penuh rasa tanggungjawab. Eratnya hubungan antara Bapak, Ibu serta antara orang tua dengan anaknya terlihat dari nama panggilan untuk orang tua. Anak-anak memanggil "paatje" untuk ayah dan "maatje" untuk ibu. Demikian pula antara suami isteri.

Kiranya pendidikan langsung dengan ditangani sendiri itu telah diperhitungkan oleh Haji Agus Salim semenjak anaknya yang pertama lahir. Ia menganjurkan istrinya untuk banyak membaca, sebab hal itu merupakan jalan yang terbaik untuk menambah pengetahuan serta mengasah kecerdasan. Adanya persiapan itu maka sang ibu tidak canggung mengajar putranya saja, menulis dan berhitung serta sang ayah siap untuk melayani semua pertanyaan dari putra-putranya. Waktu belajar khusus tidak disediakan, anak-anak setiap waktu dapat belajar dan boleh bertanya serta akan dilayani sebaik-baiknya walaupun ada tamu. Selain mengajr "paatje" dan "maatje" juga belajar, mempelajari bahan-bahan pelajaran yang lampau. Adanya hubungan yang intim antara guru dan murid membangkitkan berbagai metode mengajar, terjadilah pertukaran pikiran, diskusi

dan adu argumentasi sehingga pelajaran itu dapat diterima oleh anak secara mendalam. Apabila ayah dan ibu pergi atau menerima tamu sehingga tidak dapat mengajar, maka putranya yang lebih tua bertindak sebagai pengajarnya. Dengan demikian pelajaran dapat terus berlangsung.

Dalam mengasuh anak-anak antara ayah dan ibu terjadi semacam pembagian tugas. Sepanjang malam sang ayah dengan setia meladeni kebutuhan anaknya dari membuat susu sampai membenarkan letak selimut; sedangkan pada siang hari sang ibu yang berperan.

Menumbuhkan rasa disiplin pada anak-anak itu pun tidak mudah, harus dimulai dari para pendidiknya. Penerapan asas pendidikan bahwa mendidik pada dasarnya mendidik diri sendiri (*Opvoeding is zelf opvoeding*) adalah amat berat. Dalam hal demikian pendidik harus jujur tidak boleh bohong, untuk menjaga agar anak-anak tetap percaya kepadanya. Karena itu sebelum dapat mendisiplinkan diri sendiri sulit untuk mengajak orang lain bersikap demikian.

Setiap waktu yang senggang lebih-lebih waktu makan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendidik putra-putranya. Haji Agus Salim pandai memikat hati putra-putranya, ia dapat menyanyi pelbagai bahasa serta banyak berceritera. Tidak hentinya ia menerangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum putra-putranya puas dan mengerti. Mereka bebas menyanggah keterangan ayahnya dan dengan sabar ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.

Di dalam persoalan membaca buku putra-putranya bebas memilih, selama mereka berani membaca buku-buku itu di samping ibunya yang sedang menjahit maka tidak ada sesuatu larangan. Tumbuhlah perasaan aman dan tidak ada rahasia di antara mereka. Terhadap putra-putranya ditekankan bahwa mereka tidak hanya harus membaca buku-buku saja, tetapi harus diusahakan mempelajari sampai mengerti isinya.

Pelajaran bahasa Belanda mendapat tempat yang istimewa dalam keluarga. Kelihatannya hal ini memang paradoks. Alasannya ialah bahwa bahasa dan bangsa adalah lain. Bahasa merupakan kunci tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu pada jaman kolonial bahasa Belanda dipandang sebagai ukuran terpelajar (intelektual) tidaknya seseorang. Sehingga dengan dapat menggunakan bahasa Belanda dengan baik, maka sangat berguna untuk memupuk perasaan harga diri dan menghilangkan perasaan *minder waardigheidscomplex* (rasa rendah diri). Karena itu di dalam keluarga Haji Agus Salim sehari-hari bahasa Belanda diterapkan secara aktif.

Di dalam melaksanakan pendidikan itu, Haji Agus Salim selalu menekankan bahwa terhadap anak tidak boleh dikenakan hukuman badan. Pertumbuhan jiwa anak diusahakan terus seimbang antara kecerdasan otak dengan pengetahuan agama supaya kelak dapat tumbuh menjadi anak yang tidak *minder*, berani dan penuh tanggungjawab, serta bertaqwa kepada Tuhan. Ternyata bahwa putra-putranya yang dididik sendiri secara langsung itu membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka dapat bergaul dan mengikuti perkembangan masyarakat serta dalam kenyataannya semua putra-putranya menjadi orang yang terpandang.

Kesibukan yang luar biasa sebagai pemimpin pergerakan, wartawan, ulama, maupun dalam mengemban tugas-tugas lain sama sekali tidak mempengaruhi atau mengurangi perhatiannya kepada anak-anak.

Sifat-sifat demokratis yang dikembangkan dalam keluarga itu ternyata membawa hasil yang baik sekali. Apabila terjadi perselisihan antara papa dan mama atau di antara anak-anak, maka harus diselesaikan sebelum menjelang malam. Bagi yang salah harus mengerti dan menyadari kesalahannya dan bagi yang menang atau yang benar tidak boleh sombong. Hubungan antara suami isteri atau antara orang tua dengan anak-anak erat sekali, penuh dengan semangat, saling mencintai serta saling

menghormati. Dalam menumbuhkan suasana mesra yang sedemikian perlu sekali bantuan ibu. Ibu mempunyai peranan yang sangat besar dan menentukan dalam pertumbuhan anak-anak serta perkembangan keluarga.

Panggilan "paatje" dan "maatje" dari anak-anaknya maupun di antara suami isteri sendiri benar-benar mencerminkan keharmonisan. Panggilan ini kemudian meluas di kalangan teman-teman terdekatnya. Baik dari kalangan orang-orang Indonesia maupun orang asing. Hal ini terbukti dari rekan-rekannya mahaguru dari *Cornell* maupun *Princeton University USA*, sewaktu beliau menjadi dosen tamu dalam maa kuliah Islam dan kebudayaannya.

Haji Agus Salim berhasil membina keluarga serta mendidik putra-putranya dengan sukses, maka patutlah menjadi suri tauladan dari keluarga-keluarga yang lain. Suasana keluarga yang demikian itu merupakan salah satu faktor yang mendorong Haji Agus Salim sukses di bidang lain, terutama dalam bidang pers dan politik.

BAB IV MERINTIS JENJANG KEMAJUAN

4.1 *Karier Dalam Bidang Pers*

Pada tahun 1915 Haji Agus Salim bertekad bulat untuk menetap kembali di tanah Jawa setelah gagal memperoleh ijazah guru (*hulpacte*). Pertama-tama yang dituju adalah kota Bogor dan tidak lama kemudian pindah ke Jakarta. Semula ia mendapat pekerjaan pada kantor '*Translateur Indonesische Drukkerij*, bagian *Translateur Bureau*, yaitu kantor penterjemahan. Setelah cukup mendapatkan pengalaman ia pindah ke *Commissie voor de Volkslecteur* yang kemudian terkenal dengan nama Balai Pustaka. Di sini ia bertugas sebagai penterjemah bahasa Melayu. Pada waktu itu istilah bahasa Indonesia belum ada. Di samping itu ia tercatat sebagai redaktur ke II pada surat kabar **Neraca**, di bawah asuhan Abdul Muis. Dengan tercatatnya sebagai pengasuh surat kabar ini maka ia untuk pertama kali terjun ke dunia pers.

Semula surat kabar *Neraca* ini terbit atas bantuan dan mendapat kredit dari pemerintah Belanda. Maksud pemerintah yang waktu itu mendapat tekanan dari golongan etis, ialah untuk membangkitkan semangat membaca masyarakat. Untuk menjaga agar surat kabar ini tidak dipergunakan sebagai propaganda anti pemerintah, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada

pribadi seorang yang dapat dipercaya loyalitasnya. Dipilihnya Lanjumin Sutan Tumenggung yang berpangkat patih pada kantor *Inlandsche Zaken* sebagai pemiliknya. Datuk Tumenggung menyerahkan pimpinan surat kabar itu kepada anak mamaknya, yaitu Abdul Muis. Diharapkan setelah ditunjuk sebagai pimpinan redaksi itu aktivitas politik Abdul Muis berkurang dan bahkan akan dapat membantu meredakan pertikaian antara pihak pemerintah dan *Centraal Serikat Islam*. Seperti diketahui waktu itu Abdul Muis telah berperan dalam tubuh *Centraal Serikat Islam*, yang mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar didirikan sebuah *Koloniale Parlement*. Dewan Perwakilan rakyat ini nanti akan berhak meminta pertanggungjawaban pada pemerintah dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Tentu saja tuntutan Serikat Islam yang dinilai sangat ekstrim ini tidak dapat dikabulkan.

Setelah memangku jabatan sebagai pimpinan redaksi *Neraca*, maka kebijaksanaan Abdul Muis untuk mengelola surat kabar tersebut bertentangan kemauan dari Datuk Tumenggung. Ia menginginkan surat kabar *Neraca* masuk dalam dunia politik dengan membawakan suara dari *Centraal Sarikat Islam*. Pada hal semula surat kabar ini justru harus bertindak sebagai propaganda pemerintah dalam menghadapi perjuangan kaum pergerakan. Karena itu pertikaian antara keduanya tidak dapat dihindarkan, sehingga akibatnya Abdul Muis minta berhenti. Ia tetap menjabat sebagai anggota pengurus besar Serikat Islam dan duduk di *Volksraad* sebagai anggota yang terpilih dari anggota tersebut. Keanggotaan *Volksraad* diterimanya dengan tujuan secara lambat laun dapat mengubah Dewan itu menjadi sebuah parlemen sejati. Namun ternyata usahanya berakhir dengan sia-sia belaka.

Sebagai pengganti diangkatlah Haji Agus Salim yang semula wakil redaksi kemudian menjadi pimpinan redaksi. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa Haji Agus Salim adalah orang yang tepat menduduki jabatan itu karena cerdas, memiliki irama bahasa yang mengagumkan serta tidak ikut aktif

dalam pergerakan politik. Tetapi perkiraan Datuk Tumenggung yang demikian itu meleset sama sekali. Sebab kebijaksanaan yang dilaksanakan Haji Agus Salim tidak berbeda dengan Abdul Muis. Ia bahkan tidak hanya memperbincangkan persoalan politik saja tetapi juga mempertajam masalahnya. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di *Volksraad* diulas dengan tangkas dan dikomentari dengan tegas, sehingga jelas perbedaan kepentingan antara "kaum sana" (penjajah) dan "kaum sini" (si terjajah). Istilah kaum sana dan kaum sini diintroduksi oleh Haji Agus Salim.

Jelaslah bahwa karena sifat yang demikian tadi Datuk Tumenggung naik pitam dan tidak bertoleransi terhadap tindakan itu. Haji Agus Salim akhirnya pada permulaan tahun 1920 keluar dari surat kabar *Neraca* dan kedudukannya diganti oleh Koesoema Sutan Pamoentjak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor *Drukkerij Evolutie*.

Sebagai penterjemah di Balai Pustaka dilakukannya sampai tahun 1919. Di dalam usaha untuk merintis bacaan rakyat ia menterjemahkan karya-karya pujangga Barat seperti *Shakespeare*, *Rudyard Kipling*, *Molt* (tentang Sejarah Dunia) maupun dari kalangan pujangga Islam sendiri. setelah berpengalaman dalam mengolah terjemahan itu ia kemudian pindah ke kantor surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad*. Kebiasaan menulis terus dikembangkan dan dengan daya yang khas serta sindiran yang tajam ia mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah Belanda dan di samping itu tidak luput pula disorotinya kelemahan-kelemahan dari kaum pergerakan sendiri.

Pendirian yang teguh atas keyakinan pribadi yang mendalam itu menyebabkan Haji Agus Salim selalu pindah pekerjaan. Sejak semula memang nyata-nyata bahwa tujuan hidupnya bukanlah hanya sekedar memburu kebahagiaan material belaka, tetapi berusaha menggali khasanah pengetahuan serta pengalaman untuk dasar kemajuan. Sebagai konsekuensi dari pendirian yang demikian itu, maka tidak jarang ia tidak mendapat

pekerjaan. Sewaktu menganggur pernah dia mendapat tawaran dari pemerintah Belanda agar mau bekerja sebagai *Controleur Belasting* (Pengawas pajak) di Pontianak dengan perjanjian gaji yang menggiurkan. Tetapi dengan tegas tawaran itu ditolaknya dengan mengatakan biar Haji Agus Salim makan kerikil daripada menerima tawaran Belanda.

Kehidupan Haji Agus Salim dilaluinya dengan selalu berganti pekerjaan dan berpindah tempat kediaman. Bukannya ke rumah yang lebih mewah, tetapi bahkan ke rumah yang sewanya semakin murah. Pernah pada suatu ketika pindah ke rumah yang jorok dengan kakus yang meluap. Ibu Salim tak tahan melihat dan muntah-muntah. Dengan rela hati papa membuang pot dan mama tidak diperkenankan lagi ke WC. Suatu pelayanan yang tidak terlupakan. Memang hidupnya serba kekurangan. Ia menderita dalam arti materi tetapi bahagia dalam arti idea. Suatu hal yang menjadi ciri khas hidupnya ialah selamanya ia melarat. Situasi yang demikian itu selamanya sama sekali tidak mematahkan semangat juangnya. Dengan gigih dibela nasib bangsanya yang sedang dijajah, di samping selalu berusaha memajukan perkembangan agama Islam. Pada waktu itulah Haji Agus Salim menceburkan diri dalam dunia pers yang selanjutnya ia berpartisipasi terus dalam bidang ini sampai akhir hayatnya.

4.2 *Karier Dalam Bidang Politik*

Dalam kedudukannya sebagai wartawan, Haji Agus Salim banyak mendapatkan keterangan dari berbagai pihak. Salah satu informasi penting waktu itu yang diterimanya ialah dari Datuk Tumenggung mengenai Sarekat Islam. Perkumpulan ini dituduh oleh pemerintah Belanda akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya termasuk di antaranya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Untuk kepentingan ini Haji Agus Salim diminta menyelidikinya. Dengan cara tidak langsung mula-mula dia mempelajari seluk-beluk tentang Sarekat Islam baik mengenai asas, tujuan, anggaran dasar, anggaran

rumah tangga sampai kepada sikap para tokoh pimpinannya. Hasil pengkajian terhadap gerakan ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan pemerintah Belanda itu tidak terbukti sama sekali. Peristiwa inilah justru yang menyebabkan Haji Agus Salim tertarik dan kemudian masuk aktif menjadi pengurus Sarekat Islam.

Sarekat Islam yang semula bernama Sarekat Dagang Islam didirikan di kota Solo pada tahun 1911 oleh Wiryewikoro yang setelah menunaikan ibadah haji bernama Haji Samanhudi. Organisasi ini bersifat nasionalistis, religius dan ekonomis. Berbeda dengan perkumpulan yang sejaman waktu itu maka Sarekat Dagang Islam tidak bersifat kedaerahan, tidak membatasi anggota-anggotanya dari suku atau kelompok tertentu, melainkan keanggotaannya terbuka untuk umum. Sifat demokratisnya tercermin dari para anggota yang tidak berasal dari kaum bangsawan saja tetapi justru dari rakyat jelata. Selain itu juga terlihat dari hasil kongres-kongresnya. Jelas sekali dari namanya maka perkumpulan ini menggunakan himbauan agama.

Sedangkan sifat ekonomis tertuang dalam tujuannya ialah untuk memajukan perdagangan bangsa Indonesia di bawah panji-panji Islam serta sebagai jawaban atas tantangan kaum pedagang Cina. Jumlah anggota Serikat Dagang Islam semakin meningkat sehingga pemerintah khawatir akan perluasan ini ditambah pula adanya kericuhan yang terjadi antara pedagang pribumi dan pedagang Cina. Atas dasar ini maka pada tanggal 12 Agustus 1912 perkumpulan itu telah dianggap melanggar peraturan pemerintah dengan mengobarkan huru-hara anti Cina sehingga membahayakan ketertiban umum. Karena itu Residen Wijch (residen Surakarta) memutuskan untuk mengskors Sarekat Dagang Islam. Setelah diadakan penggeledahan-pengeledahan di rumah pemimpin-pemimpin Sarekat Dagang Islam ternyata tidak terbukti adanya tanda-tanda bahwa organisasi ini akan menentang pemerintah, akibatnya skorsing dicabut pada tanggal 26 Agustus 1912.

Di kalangan para pemimpin Sarekat Dagang Islam timbul niat untuk memperluas kegiatannya. Pada tanggal 10 September 1912 dengan kedatangan Tjokroaminoto di Solo maka disusunlah *statuten* baru yang isinya memperluas dan mempergiat usaha di bidang sosial, pendidikan, agama serta perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Pengesahannya dilakukan di hadapan notaris B. Terkuile. Pemerintah Belanda selalu mengikuti perkembangan-perkembangan ini dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk melokalisasi kegiatan Sarekat Islam sehingga baik pengikut-pengikutnya maupun kegiatannya diharapkan hanya terjadi di daerah Solo saja. Tantangan yang demikian itu tidak ditinggalkan saja oleh pengurus Sarekat Islam sebab dua hari kemudian yaitu pada tanggal 12 September 1912 setelah sampai di Surabaya Tjokroaminoto menyampaikan *statuten* Sarekat Islam itu. Haji Samanhudi menjabat *President Hoofd Bestuur* (Ketua Pengurus Besar) yang pertama, sedangkan komisarisnya dipegang oleh Tjokroaminoto.

Tujuan yang dirumuskan dalam anggaran dasar baru tadi antara lain ialah memajukan semangat dagang bangsa Indonesia dan meningkatkan kecerdasan rakyat serta hidup dengan patuh melakukan ajaran-ajaran agama. Di dalam anggaran dasar baru tadi memang tujuan politik tidak dicantumkan, karena jelas hal itu dilarang oleh Undang-Undang Kolonial dalam peraturan pemerintah (*Regerings reglement*) pasal 111.

Empat bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1913 diadakan kongres Sarekat Islam yang pertama bertempat di kota Surabaya di bawah pimpinan Tjokroaminoto. Diterangkan bahwa Sarekat Islam bukan organisasi politik dan tidak ada pula berniat melawan pemerintah Belanda. Malahan dinyatakan bahwa dengan agama Islam sebagai lambang persatuan, maka timbullah kehendak untuk mempertinggi derajat rakyat; akibatnya dalam waktu yang singkat jumlah pengikut Sarekat Islam semakin banyak dan cabang-cabangnya kian meluas.

Dalam waktu yang singkat diselenggarakan lagi kongres

yang kedua di Solo pada bulan Maret 1913. Diputuskan dalam kongres ini bahwa keanggotaan Sarekat Islam hanya terbuka untuk bangsa Indonesia dan sedapat mungkin tidak menerima anggota dari pamongpraja. Tindakan ini terpaksa diambil untuk menjaga agar Sarekat Islam tetap merupakan organisasi rakyat, sebab dipandang oleh Sarekat Islam bahwa pegawai pamongpraja adalah alat pemerintah kolonial.

Perkembangan Sarekat Islam yang menggembirakan itu jelas merisaukan hati pemerintah Belanda. Karenanya pada tanggal 30 Juni 1913 pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa cabang-cabang Sarekat Islam harus berdiri sendiri secara otonom, (Sarekat Islam Lokal). Sarekat Islam di daerah-daerah itu boleh bekerja sama di bawah naungan badan perwakilan yang ditangani oleh pengurus pusat. Sedangkan anggaran dasar Sarekat Islam lokal itu sama, utamanya himbauannya tetap ajaran agama Islam, sedang tujuannya:

- a. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran.
- b. Memajukan hidup menurut perintah agama Islam serta menghilangkan faham-faham yang keliru tentang agama Islam.
- c. Mempertebal rasa persaudaraan dengan semangat tolong menolong dengan sesama anggota.

Untuk menggalang kerjasama di antara Serikat Islam daerah yang pada waktu itu telah mencapai 50 buah, maka pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Sentral Sarekat Islam dengan tujuan utamanya ialah membantu dan memajukan Sarekat Islam daerah. Pada saat itulah Agus Salim mulai terjun ke gelanggang politik dengan menjadi anggota pengurus Sentral Sarekat Islam bersama-sama Abdul Muis, Wondoamiseno, Sosrokardono, Suryopranoto, Alimin Prawirodirjo dan lain-lain.

Dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari delapan puluh Sarekat Islam daerah, maka di Bandung pada tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 1926 diadakan Kongres Sarekat Islam Nasional yang pertama. Tentang istilah Nasional dimaksudkan agar organisasi

ini bertujuan ke arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia dan berusaha meningkatkan derajat bangsa pribumi setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Meskipun selalu terlempar tuduhan bahwa Sarekat Islam akan menggunakan cara-cara kekerasan namun jelas dalam keputusan konggres ini bahwa Sarekat Islam dalam mewujudkan cita-citanya akan senantiasa menempuh cara-cara konstitusional dan dengan jalan revolusi berusaha agar bangsa Indonesia dapat turut serta dalam pemerintahan.

Pertumbuhan yang pesat dari Sarekat Islam ini menimbulkan rasa tidak senang dari pemerintah kolonial, sedangkan berbagai organisasi yang lain seperti *Nationale Indische Partij* (NIP) dan *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV), selalu berusaha untuk mendapatkan pengaruh dalam tubuh Sarekat Islam itu. Kedua organisasi ini berhaluan sama, yaitu sosialisme kiri, sehingga sasaran utamanya agar memperoleh anggota yang banyak ialah rakyat jelata. Namun karena organisasi ini dikenal oleh golongan peranakan (Indo Belanda) maka tidak mendapat tempat di hati rakyat. Inilah yang menyebabkan kedua partai tadi berpaling untuk mendapatkan pengaruh dalam tubuh Sarekat Islam. Dalam usahanya itu ISDV lebih berhasil karena selain memiliki program yang mirip dengan Sarekat Islam yaitu menentang kapitalisme juga mempunyai tenaga muda andalan yang dapat diselundupkan ke dalam tubuh Sarekat Islam. Mereka itu ialah Semaun dan Darsono. Kedua orang ini selain menjadi anggota pengurus ISDV juga sekaligus menjadi anggota pengurus Sarekat Islam.

Konggres Nasional Sarekat Islam yang kedua dibuka di Jakarta pada tanggal 20 sampai dengan 27 Oktober 1917. Langkah-langkah yang diambilnya terutama ditujukan kepada pemerintah jauh lebih maju dan lebih berani daripada konggres sebelumnya. Meskipun demikian dalam gerakan-gerakannya tetap disetujui cara-cara yang parlementer evolusioner. Corak lain dalam konggres ini diwarnai dengan adanya perbedaan pendapat antara Semaun yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Cabang Sarekat Islam Semarang dengan para pemimpin

yang lain. Semaun mengusulkan agar Sarekat Islam tidak ikut campur dalam gerakan *Indie Weerbaar*, di mana Abdul Muis duduk sebagai wakil Sarekat Islam. Selain itu Semaun juga menentang masuknya wakil Sarekat Islam dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang akan dibentuk.

Kedua usul ini ditolak oleh konggres. Abdul Muis tetap melaksanakan tugas sebagai anggota utusan *Indie Weerbaar* yang dikirim ke Negeri Belanda. Pada waktu itu Haji Agus Salim mengeluarkan pendapat menentang usul Semaun tentang keanggotaan Sarekat Islam dalam *Volksraad*. Karena dia percaya bahwa *Volksraad* dapat dipergunakan sebagai mimbar resmi untuk menyatakan kerisauan dan tuntutan rakyat pada pemerintah kolonial Belanda. Pendapat ini diterima oleh konggres dan setahun kemudian sewaktu *Volksraad* dibuka oleh Gubernur Jendral Mr. Graaf van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918, Sarekat Islam mengirimkan Tjokroaminoto sebagai anggota yang ditunjuk oleh pemerintah dan Abdul Muis sebagai anggota yang dipilih. Dengan demikian Sarekat Islam menjalankan politik kooperasi.

Dalam konggres Nasional Sarekat Islam kedua yang berlangsung di Surabaya antara tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober 1918 diputuskan untuk menentang pemerintah jika dalam tindakannya pemerintah melindungi kapitalisme. Pegawai pemerintah dianggap sebagai alat penyokong kepentingan kaum kapitalis. Kepentingan kaum buruh hendaknya dijamin dengan peraturan-peraturan sosial. Di samping itu hendaklah ditentukan upah minimum dan jam kerja maksimum serta dirasa perlunya mengorganisasi kaum buruh. Haji Agus Salim selalu mengikuti kegiatan Semaun dalam bidang perburuhan, bahkan pada tahun 1920 mereka berdua bersama-sama duduk dalam pengurus Vak Sentral di Yogyakarta. Semaun sebagai ketua sedang Haji Agus Salim sebagai sekretaris. Dari sini tampak jelas betapa gigihnya Semaun membawa Sarekat Islam bergeser ke kiri.

Karena selalu mendapat desakan dari golongan etis, maka

pada tanggal 18 Nopember 1918 Ratu Wilhelmina mengucapkan pidato yang pada pokoknya berisi janji pemerintah Belanda bahwa terhadap rakyat Hindia Belanda akan diperluas hak-hak politiknya. Pidato ini kemudian terkenal dengan sebutan *De November Belofte van 1918* (Janji Nopember) yang tak pernah terwujud.

Dalam menanggapi masalah ini di dalam *Volksraad* ada tanggal 25 Nopember 1918, Tjokroaminoto mengajukan mosi yang menuntut agar pemerintah Belanda membentuk parlemen yang sejati dengan anggota-anggotanya yang dipilih oleh rakyat serta mempunyai hak mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Mosi ini didukung oleh anggota-anggota *Volksraad* antara lain Abdul Muis, Radjiman, Thayeb, Ciptomangunkusuma Cramer, Sastrowiyono, dan Dwijosewoyo. Pada tanggal 3 Desember 1918 diajukan pula mosi yang senada oleh A. Jayadiningrat.

Dalam usaha untuk menjawab mosi tadi, maka pada tanggal 17 Desember 1918 pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang disebut *Herzieningscommissie* (Panitia Peninjauan Kembali) yang diketuai oleh Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting. Komisi ini berjalan lamban sekali. Hasilnya baru selesai pada pertengahan tahun 1920 yang dikirimkan ke Negeri Belanda pada tanggal 30 Juni 1920. Keputusan pemerintah Belanda di Nederland sangat mengecewakan yang menolak mosi tersebut.

Sehubungan dengan penolakan mosi tersebut maka timbulah perbedaan pendapat dalam Sarekat Islam. Sosrokardono dengan gigih menganjurkan agar H.O.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis mengundurkan diri, karena tidak ada gunanya berdebat dalam "komidi omong" (*Volksraad*) tersebut. Pembicaraan yang diadakan tidak akan dapat memperbaiki keadaan rakyat. Sampai waktu itu Haji Agus Salim masih percaya akan manfaat *Volksraad*. Sehingga ia membela pendirian-pendirian yang mendukung ketetapan Sarekat Islam dengan wakilnya di dalam *Volksraad*. Sekalipun tidak akan berhasil tetapi kepentingan rakyat itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh melalui

saluran yang legal. Pendapat Haji Agus Salim ini diuraikan secara panjang lebar di dalam surat kabar *Neraca* yang ditutup dengan semboyan yang jitu yaitu "Jangan lari, jangan ngambek, itu perbuatan anak-anak". Namun demikian nantinya setelah berjuang dengan gigih selama tiga tahun di *Volksraad* nyatanya hasilnya nihil, sehingga Haji Agus Salim mengakui kebenaran itu dan secara konsekuen mengundurkan diri sebagai anggota *Volk-sraad*.

Keberhasilan revolusi Oktober di Rusia pada tahun 1917 berpengaruh dalam Pergerakan Nasional terutama organisasi yang berhaluan Marxis. ISDV semakin jelas berpaham kiri dan menyatakan diri sebagai Partai Komunis. Karena itu usahanya untuk merongrong Sarekat Islam dengan mempengaruhi kebijaksanaan pimpinan serta menarik sebanyak mungkin anggota Sarekat Islam semakin gencar. Perpecahan antara dua kelompok dalam tubuh Sarekat Islam itu tidak dapat dicegah lagi. Di dalam keadaan kritis ini sangat diperlukan tampilnya pemimpin-pemimpin yang berani bertindak secara bijaksana dan tegas dalam tubuh Sarekat Islam waktu itu. Untung sekali Sarekat Islam berhasil diselamatkan dari kemelut itu dengan terwujudnya dwi tunggal pimpinan Sarekat Islam, yaitu HOS Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim.



Haji Agus Salim sedang bercakap-cakap dengan Presiden Amerika Serikat D. Eisenhower di tengah-tengah para peserta Colloquium on Islamic Culture di Amerika Serikat.

BAB V HAJI AGUS SALIM DAN PERKEMBANGAN SI

5.1 *Perpecahan Dalam Sarekat Islam*

Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 sampai dengan 1918 secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Hubungan antara Negeri Belanda dan Hindia Belanda (Indonesia) sangat renggang sehingga pemerintah Hindia Belanda dalam mengambil keputusan-keputusannya sangat dipengaruhi oleh keadaan setempat. Dengan demikian keadaan pemerintah Hindia Belanda terjepit, sehingga dengan rasa tertekan dan tergesa-gesa Gubernur Jendral van Limburg Stirum mengucapkan *Zelf Bestuur* (Pemerintah sendiri) untuk bangsa Indonesia dalam sidang *Volksraad* dengan tujuan untuk meredakan tuntutan kaum pergerakan. Janji tersebut tak pernah kunjung datang malahan setelah Perang Dunia I selesai tindakan van Limburg Stirum itu dinilai oleh negeri Belanda sangat memberi hati kepada kaum pergerakan, sehingga di la pihak sangat memalukan pemerintah Belanda. Inilah yang menyebabkan Gubernur Jendral van Limburg Stirum segera dipanggil pulang ke negeri Belanda dan kedudukannya diganti oleh Gubernur Jendral De Fock dengan tugas untuk menindas pergerakan nasional Indonesia secara tegas. Di samping

itu kemenangan revolusi Oktober 1917 di Rusia juga berpengaruh di kalangan kaum pergerakan. Semaun yang memang sengaja diselundupkan oleh ISDV ke tubuh Sarekat Islam untuk mempengaruhi jalannya partai tersebut semakin meningkat propagandanya. Pada waktu itu Semaun menjabat sebagai pemimpin Sarekat Islam cabang Semarang, sehingga dengan lebih leluasa dapat menyebarkan ide-idenya kepada pemimpin Sarekat Islam yang lain. Inilah yang menyebabkan mengapa Semaun pada Kongres Nasional Sarekat Islam yang ke II di Jakarta tanggal 20 sampai dengan 27 Oktober 1917 bersuara semakin lantang. Semaun menentang keras masuknya wakil Sarekat Islam dalam *Volksraad* Sebab menurut penilaiannya perjuangan melalui saluran parlementer tidak akan memberi hasil yang memuaskan. Di sini lah mula pertama pertentangan terjadi antara Semaun, Darsono dengan kelompok Tjokroaminoto, Abdul Muis dan Haji Agus Salim. Usul Semaun ternyata ditolak oleh Kongres.

Sebenarnya dalam menghadapi propaganda kaum kiri dalam tubuh Sarekat Islam itu pemimpin-pemimpinnya bertindak sangat toleran. Hal ini dapat dibaca dari anggaran dasarnya bahwa Sarekat Islam pun menentang kapitalisme yang berdosa.

Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang sama sekali tidak menghendaki adanya perpecahan selalu bersikap bijaksana. Sebagai pembicara yang ulung dia berusaha mengikat pengikut-pengikutnya dan mengajak untuk bersatu dalam berjuang menentang penjajahan. Dalam hubungan antara Islam dan Sosialisme ia berpendapat bahwa di dalam agama Islam sebenarnya sudah terkandung unsur-unsur sosialisme. Agama islam menghendaki keadilan dan kemakmuran rakyat melalui cara-cara yang legak dan diridhoi oleh Tuhan. Untuk mencapai tujuan ini memang sosialisme mengajarkan dua jalan yaitu dengan jalan lunak yang berarti bersikap reformis dan bersedia kompromi dengan kaum muda, sedangkan yang kedua melalui jalan revolusioner atau kekerasan, di mana aliran yang kedua ini tidak

mengenal kompromi dan dalam memperjuangkan cita-citanya bersifat dinamis dialektis. Aliran inilah yang kemudian menjelma menjadi komunisme dan memang dalam komunisme diajarkan *Het doel heiligt de middelen* (Tujuan menghalalkan cara). Jelaslah di sini sosialisme yang dikehendaki Sarekat Islam ialah sosialisme-religius.

Haji Agus Salim sangat menyokong pendirian HOS Tjokroaminoto itu dengan menyatakan bahwa Islam yang berkembang selama 12 abad di dunia ini lebih dahulu daripada Marxisme yang mengajarkan sosialisme. Memang istilah sosialisme baru populer dalam abad ke sembilan belas. Sosialisme Marx adalah anti agama. Sedangkan tujuannya yang menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil bebas dari kemiskinan itu telah lebih dahulu dibentangkan dalam ajaran agama Islam. Karena itu menjadi kewajiban intelektual Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial yang telah dipelopori oleh HOS Tjokroaminoto, sehingga mampu menunjukkan segi-segi sosialisme dalam Islam.

Semakin kuatnya kelompok marxis terlihat pula dari adanya perubahan nama yang tegas, yaitu ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 23 Mei 1920 dengan susunan pengurus Semaun sebagai ketua umum dan Darsono sebagai wakil ketua. Dalam konggres PKI Istimewa yang diadakan tanggal 24 Desember 1920 Semaun dengan berani menyerang SI dengan mengatakan bahwa SI yang sebenarnya dikendalikan oleh kaum saudagar dan kaum industri itu justru malahan menyokong kapitalisme dan merugikan pergerakan rakyat.

Jiwa besar para pemimpin Sarekat Islam dalam menghadapi komunisme itu masih jelas dalam konggres tanggal 2 sampai dengan 6 Maret 1921. Dalam konggres ini Haji Agus Salim memegang peranan penting, karena ia disertai tugas bersama Semaun (dua orang komisar) untuk menetapkan dasar-dasar baru sebagai pengganti dasar 1917 yang pada pokoknya menentukan bahwa penjajahan dalam bidang politik dan ekonomi itu dise-

babkan kapitalisme dan kapitalisme itu hanya dapat dilenyapkan dengan terwujudnya persatuan antara kaum buruh dan kaum tani. Sarekat Islam pun bersedia bekerjasama dengan partai-partai sepaham di seluruh dunia, namun dengan tetap memperhatikan agama Islam sebagai landasan. Sampai saat itu memang Sarekat Islam masih memberikan hati pada kaum komunis yang ternyata dari keanggotaan Semaun dan Darsono. Mereka sebagai ketua dan wakil ketua PKI di samping masih memegang jabatan sebagai pengurus Sarekat Islam. Mereka pun tetap berusaha berada dalam Sarekat Islam. Mereka pun tetap berusaha berada dalam Sarekat Islam dengan maksud agar dapat menggantikan inti batin organisasi tadi dari Islam menjadi komunis.

Siituasi yang demikian itu sangat merugikan Sarekat Islam, sehingga bagaimana pun rong-rongan dari kelompok komunis itu harus dilenyapkan. Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam memang tidak dapat dihindarkan dan tindakan tegas harus diambil. Setelah melalui rapat pengurus besar, maka diambil keputusan untuk mengadakan konggres pada tahun itu juga yaitu konggres ke enam di Surabaya tanggal 10 Oktober 1921. HOS Tjokroaminoto seorang pemimpin yang mendambakan persatuan dan selalu dapat mencegah timbulnya perpecahan tidak dapat hadir dalam konggres itu, sehingga pimpinan sidang digantikan oleh Haji Agus Salim bersama Abdul Muis. Dalam perdebatan dengan Semaun, Haji Agus Salim berhasil memancing Semaun untuk mengemukakan sikapnya terhadap agama Islam. Di sinilah Semaun terpaksa harus membuka kartu dan menyatakan sikap netral terhadap agama Islam dan menghendaki tetap menjadi anggota Sarekat Islam.

Sikap yang demikian ini tidak dapat diterima, sehingga Haji Agus Salim mengemukakan pendapatnya untuk menjaga kelestarian dan perkembangan Islam terpaksa harus diterapkan disiplin partai. Setiap anggota harus memilih salah satu keanggotaan partai saja, tidak diperkenankan beranggota ganda.

Dengan diterimanya ide disiplin partai tadi dalam kongres tersebut maka keluarlah Semaun cs dari Sarekat Islam. Inilah yang menjadi sebab langsung pecahnya cabang-cabang Sarekat Islam menjadi cabang Sarekat Islam Putih yaitu yang masih setia pada pimpinan dwi tunggal HOS Tjokroaminoto - Haji Agus Salim dan Sarekat Islam Merah yang mengikuti jejak Semaun -- Darsono. Sarekat Islam Merah ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat sebagai *ondervouw*. (susunan bawah) dari Partai Komunis Indonesia.

Jika di dalam tubuh Sarekat Islam terjadi perpecahan maka dari pihak luar yaitu pemerintah kolonial Belanda selalu mengikuti gerakan-gerakan cabang Sarekat Islam dan mencari kesalahan-kesalahan anggotanya untuk memukul organisasi tadi. Hal ini terbukti dari peristiwa Cimarame di Garut yaitu ketika seorang Haji (Haji Hasan Arif) dianggap melawan pemerintah karena tidak mau menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah, yang mengakibatkan dibunuhnya Haji Hasan Arif sekeluarga. Karena di dalam pengusutan ternyata bahwa Haji Hasan adalah anggota Sarekat Islam maka peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi pemerintah kolonial untuk menghadapi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam. Namun untuk sekali HOS Tjokroaminoto dapat dibebaskan dari *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) karena tuduhan-tuduhan tidak dapat dibuktikan.

Dengan terjadinya perpecahan ini maka tugas pimpinan Sarekat Islam semakin berat yaitu mengusahakan timbulnya kembali kepercayaan di kalangan anggota. Sehubungan dengan ini Haji Agus Salim tidak tinggal diam yang kemudian berjuang untuk menggalang persatuan di kalangan penganut agama Islam.

5.2 Menghimpun Persatuan di Kalangan Umat Islam

Tumbuhnya faham baru komunisme dan rongrongannya terhadap Sarekat Islam yang menimbulkan pecah belahnya partai tersebut menyadarkan pimpinan Sarekat Islam untuk lebih memperkokoh persatuan di antara umat Islam.

Demikianlah atas prakarsa Sentral Sarekat Islam diadakan Konggres Al Islam I di Cirebon pada tanggal 21 Oktober sampai 2 Nopember 1922. Di dalam konggres tadi Haji Agus Salim untuk pertama kali mengemukakan pentingnya persatuan di antara umat Islam untuk menghindarkan diri dari berkecamuknya pengaruh pihak lain. Dibentangkanlah idenya tentang Pan Islamisme yang akan mengusahakan tercapainya persatuan semua aliran dan kerjasama antara kaum muslimin terhadap masalah yang hangat mengenai agama Islam.

Dengan bekerja sama antara Sarekat Islam dengan Muhammadiyah, maka diadakanlah Konggres Al Islam II di kota Garut pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1924. Haji Agus Salim bertindak sebagai pimpinan konggres dibantu oleh pengurus besar Muhammadiyah. Di dalam prasarananya ia menguraikan tentang fungsi agama dan ilmu pengetahuan, hubungan Islam dengan sosialisme.

Di samping itu juga dikemukakan kecamannya terhadap kapitalisme yang semata-mata hanya mengajar keuntungan. Agama Islam menolak gejala tersebut dengan larangan adanya riba. Dalam konggres itu dirumuskan tujuan konggres, yaitu dengan tegas dinyatakan perlunya peningkatan persatuan kaum muslimin. Karena itu konggres harus turut aktif dalam usaha menyelesaikan soal khalifah yang menyangkut kepentingan seluruh kaum muslimin.

Untuk menyongsong konggres Khalifah yang diadakan di Kairo pada bulan Maret 1925 maka dilangsungkanlah Konggres Al Islam luar biasa di Surabaya pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1924. Pada waktu itu disusunlah personalia utusan yang akan menghadiri konggres khalifah yaitu : Haji Fahrudin sebagai anggota Pengurus Besar Muhammadiyah dan Pengurus Besar Sarekat Islam, Suryopranoto sebagai Komisaris Sakrekat Islam dan Ketua perkumpulan Sarekat sarekat sekerja, serta Haji Abdul Wahab sebagai Ketua perkumpulan-perkumpulan agama di Surabaya. Ternyata kemudian bahwa konggres khali-

fah di Kairo itu dibatalkan yang mengakibatkan Sarekat Islam dan Muhammadiyah menjadi kecewa.

Pada tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus 1925, Sentral Sarekat Islam mengadakan konggres bersama dengan Al Islam di Yogyakarta. Dalam konggres ini Haji Agus Salim memper-tegas sifat Sarekat Islam setelah Sarekat Islam mengikuti dengan tekun kegiatan politik pemerintah kelonial dengan jalan koope-rasi. Cara tersebut tidak dapat dipertahankan dan Sarekat Islam memutuskan untuk melakukan sikap non kooperasi yang ditan-dai keluarnya Haji Agus Salim dari *Volksraad*. Haji Agus Salim mengemukakan tentang Nasionalisme Islam yang ingin me-ngemukakan tentang Nasionalisme Islam yang ingin memajukan negara dan bangsa berdasarkan cita-cita Islam. Dijelaskan ten-tang ide Pan Islamisme serta sikap yang tegas terhadap kapi-talisme yang berdosa serta sebab-sebab Sarekat Islam bersikap non koperasi. Dalam tindakan-tindakan. Di samping itu HOS Tjokroaminoto menegaskan bahwa Sarekat Islam dalam me-ningkatkan kecerdasan rakyat akan mendirikan sekolah-seko-lah yang bersifat kebangsaan. Di dalam menghadapi kapita-lisme yang berdosa yang selalu menindas dan menghisap rak-yat, maka dikemukakan gerakan baru yang disebut dengan ge-rakan Tanzim, yaitu gerakan yang ber tujuan untuk memajukan kehidupan rakyat dalam bidangekonomi, sosial dan kebudayaan berdasarkan asas-asas Islam.

Komite Kongres Al Islam sebagai badan tetap yang didirikan berdasarkan keputusan Konggres Al Islam II di Garut menang-gapi secara positif adanya Konggres Islam Sedunia di Mekah pada tanggal 1 Juni 1926. Karena itu ditetapkanlah persona-lia utusan, Yaitu Tjokroaminoto dari Sentral Sarekat Islam dan Haji Mansur dari Muhammadiyah.

Dengan adanya partisipasi yang demikian tadi maka dalam konggres diputuskan untuk mendirikan cabang di Hindia Timur, sehingga dengan ini Konggres Al Islam berubah namanya men-jadi Mukhtar Al Alam, Al Islam faral Hind asi Svarqiah. di-

singkat MAIHS (Konggres Islam Sedunia, Cabang Hindia Timur).

Laporan lengkap dari kedua utusan tadi disampaikan dalam konggres PSI dan MAIHS pada bulan September 1926 di Surabaya. Ditetapan bahwa Surabaya sebagai pusat dari pada MAIHS dan Haji Agus Salim terpilih sebagai pemimpinnya. Setelah mendengarkan keterangan lengkap serta keadaan jemaah haji di Mekkah maka dibentuklah suatu organisasi yang disebut *Hadz Organisasi Hindia* yang bertujuan memberi keterangan tentang seluk-beluk perjalanan haji.

Tiga bulan kemudian yaitu pada bulan Desember 1926 di Bogor diadakan kongres bersama antara SI dan MAIHS. Dibentangkan oleh Haji Agus Salim tentang program kerja dan kegiatan MAIHS terutama dalam menjawab pertanyaan pemerintah kolonial yang semakin campur tangan dalam persoalan agama.

Bagaimana pun Sarekat Islam menerapkan disiplin partai terhadap Muhammadiyah sehingga kedua organisasi itu tidak bisa dirangkap keanggotaannya. Rapat pertama Majelis Ulama di Kediri pada tanggal 27 sampai tanggal 30 September 1928 secara resmi bernaung di bawah panji-panji Sarekat Islam. Demikianlah usaha yang tidak kenal menyerah dari Haji Agus Salim dalam membina Sarekat Islam khususnya dan persatuan umat Islam Indonesia pada umumnya dalam menghadapi rong-rongan komunis dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda.

5.3 Sebagai Anggora Volksraad

Dengan dibentuknya Volksraad (Dewan Rakyat) pada tanggal 18 Mei 1918 maka pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk dapat menaikan kaum pergerakan. Dalam menghadapi kenyataan ini sikap Sarekat Islam adalah kooperasi, artinya bersedia mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk sebagai anggota dewan tersebut. Dari hasil konggres Sarekat Islam dicalonkan HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai wakil-wakil Sare-

kat Islam dalam dewan rakyat itu.

Keduanya menerima keanggotaan tadi dengan dasar masih percaya pada iktikad baik pemerintah kolonial dan akan berusaha sekuat tenaga dengan jalan evolusi mengubah dewan itu menjadi parlemen yang sejati. Ternyata sampai tahun 1921 perjuangan Tjokroaminoto cs tidak berhasil sehingga diputuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan *volksraad*.

Kedudukan itu kemudian digantikan oleh Haji Agus Salim sampai tahun 1924. Dia menerima keanggotaan itu sebab sampai saat itu dia masih percaya bahwa Dewan itu merupakan tempat untuk mengemukakan jeritan rakyat serta sarana legal dan demokratis guna menyampaikan tuntutan kaum pergerakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebab nasib rakyat harus diperjuangkan terus dan sedapat mungkin melalui forum resmi. Sebagai anggota *Volksraad* Haji Agus Salim berhasil menunjukkan dirinya sebagai pembicara yang ulung, ahli debat serta berani melancarkan kritik-kritik yang tajam terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Dalam rangka menumbuhkan nasionalisme di kalangan intelektual itu untuk peratama kalinya dia berpidato dalam bahasa Melayu (Indonesia). Usaha ini mendapat tantangan keras serta protes dari ketua dan anggota dewan rakyat yang berbangsa Belanda. Dikatakannya bahwa Haji Agus Salim pandai berbahasa Belanda tetapi mengapa mempergunakan bahasa Melayu, untuk itu diminutanya agar berpidato dalam bahasa Belanda. Namun dengan hati yang teguh ia tetap berbahasa Melayu.

Pada waktu Haji Agus Salim berpidato dalam bahasa Melayu dan menguraikan secara panjang lebar tentang keadaan rakyat Indonesia ia mengemukakan istilah "ekonomi." Dengan cepat anggota *Volksraad* dari wakil Zending, Bergmeyer mengajukan interupsi dengan mengajukan pertanyaan apakah perkataan ekonomi itu ada dalam bahasa Melayu. Dengan tangkas dan jitu dijawabnya dengan mengatakan, "Coba Tuan Yang terhormat, salinlah lebih dahulu kata ekonomi itu dalam bahasa Belanda

kemudian nantinya saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu". Demikianlah tepatnya jawaban itu sehingga di penanya tidak dapat berkata apa-apa lagi sebab memang untuk istilah ekonomi bahasa Belanda sendiri pun tidak memiliki terjemahan yang cocok sebab perkataan *staats huishoudkunde*: yang dipergunakan sebagai salinan resmi ekonomi itu tidak mencerminkan arti yang sebenarnya.

Diajukan mosi menentang peraturan-peraturan pemerintah mengenai perkawinan, urusan-urusan masjid dan pelajaran agama. Dalam jangka waktu sebulan konggres Bogor itu dilanjutkan dalam konggres Pekalongan yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Januari 1927. Tantangan terhadap campur tangan pemerintah pada masalah agama semakin tajam dengan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah bahwa atas dasar hukum yang manakah pemerintah mengadakan intervensi itu dan hal ini menyimpang dari janji-janji pemerintah sendiri yang sebelumnya pemerintah selalu mendengung-dengungkan bahwa akan berdiri di atas segala macam agama dan tidak akan ikut campur dalam persoalan agama. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah kolonial Belanda menjamin kebebasan beragama pada hal di dalam kenyataannya tidak demikian, karena itu wajiblah bagi Sarekat Islam untuk menentang tindakan-tindakan pemerintah itu.

Supaya hasil konggres itu tersebar luas maka Ijokroaminoto dan Haji Agus Salim ditugasi untuk memberi penjelasan ke seluruh kota-kota penting di Jawa mulai tanggal 2 Mei 1927. Tujuan Sarekat Islam di dalam konggres itu pun digariskan dengan tegas, yaitu menuju kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan agama Islam. Dan untuk memperkuat kedudukan agama Islam dalam dunia internasional, maka diusahakan untuk bergabung dengan Liga yang menentang penjajahan. Menanggapi akan diselenggarakannya konggres Islam sedunia maka untuk itu konggres memilih haji Agus Salim sebagai -- utusan. Akibatnya Haji Agus Salim pada tahun 1927 pergi ke Mekkah.

Setelah kembali dari Mekkah Haji Agus Salim mencanangkan ide yang cemerlang, yaitu perlunya didirikan majelis Ulama. Anggota Majelis Ulama ini terdiri dari para ahli agama Islam. Sedangkan tugas utamanya ialah mengadili persoalan-persoalan yang timbul dalam hal pengajaran agama Islam. Cita-cita itu dikemukakan dalam konggres di Pekalongan pada tanggal 28 September sampai 2 Oktober 1927, dan terwujudlah dalam konggres khusus Sarekat Islam untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 Sarekat Islam pada tanggal 26 sampai 20 Januari 1928 di Yogyakarta. Dalam hal ini timbul pertentangan antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah karena Muhammadiyah ingin terus melaksanakan perjuangannya dalam bidang sosial dan pendidikan serta bersedia menerima subsidi untuk beberapa sekolahnya dari pemerintah kolonial Belanda.

Dasar pemikiran mengapa Muhammadiyah bersedia menerima subsidi itu, ialah uang pemerintah penjajahan Belanda itu pada hakekatnya berasal dari seluruh rakyat Indonesia sendiri. Jadi uang bangsa Indonesia sendiri, sebenarnya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang diberi subsidi oleh Pemerintah oleh pemerintah Belanda itu hanya sebagian yang amat kecil dari jumlah sekolah Muhammadiyah seluruhnya, lagi pula dibandingkan dengan subsidi yang diterima oleh golongan lain maka subsidi kepada Muhammadiyah itu sungguh kecil sekali.

Di dalam menganalisa sebab-sebab pertentangan antara pemerintah Belanda (kaum sana) dan semua golongan yang membantunya dengan kaum sini, yaitu bumi-putera atau fihak rakyat (demokrat), dikarenakan sikap kaum sama yang mengutamakan kebijaksanaan dan tanah air Belanda di atas kebijaksanaan bangsa dan bumi pertiwi Indonesia, serta memperlakukan bangsa Belanda di atas bangsa Hindia. Sehubungan dengan itu kaum pergerakan tidak boleh memperhatikan "orang" nya dan menerapkan perasaan cinta atau benci, melainkan semata-mata berikhtiar mencari jalan bagi kaum sini untuk mengalah-

kan gerakan-gerakan kaum sana. Kemajuan yang hendak dicapai haruslah berlandaskan atas asas-asas kebudayaan bangsa sendiri serta mengambil yang positif dari pengajaran Barat. Hendaknya disadari jangan begitu saja menerima kemajuan Barat sebab dari merekapun didapatkan pelajaran yang keliru seperti terbukti dengan timbulnya peperangan dahsyat di antara mereka sendiri yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dengan demikian kemajuan yang ingin diwujudkan ialah kemajuan sejati yang sesuai dengan karakter bangsa sendiri khususnya dan watak bangsa timur pada umumnya yang tidak hanya mementingkan materi saja.

Ternyata bahwa pertikaian antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda bukan disebabkan karena kecintaan atau kebencian antara kedua bangsa melainkan semata-mata karena adanya pertentangan antara gerakan dan pertentangan antara faham dengan faham. Karena itu kita tidak membenci bahasa atau bangsa Belanda, tetapi kepada sistem dan faham yang dianutnya. Sedang pertentangan itu sendiri karena pengaruh perubahan jam serta meningkatnya kecerdasan bangsa yang terwujud dalam bentuk pengarahannya nasional. Kaum cendekiawan sebagai motor penggerak pergerakan tidak dapat diam terhadap perbedaan-perbedaan yang menyolok antara bangsa yang menjajah dan yang dijajah. Karena itu sudah sewajarnya kalau rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menyusun pemerintahan sendiri. Anggapan bahwa Bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan, belum mampu berdaulat adalah tidak tepat dan tidak benar. Haji Agus Salim selalu mengatakan bahwa bagaimana pun suatu bangsa harus memiliki pengalaman terhadap pahit maupun manisnya kemerdekaan dan untuk merasakan itu maka bangsa tadi harus merdeka lebih dahulu.

Suara lantang yang diucapkan Haji Agus Salim dalam *Volksraad* senada dengan sikap pergerakan nasional pada waktu itu. Semboyan Indonesia untuk bangsa Indonesia yang dengan tegas dinyatakan oleh Perhimpunan Indonesia diterima oleh kaum pergerakan. Majalah *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh

Perhimpunan Indonesia serta **simpatisan-simpatisannya** dari **perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda** itu benar-benar memberi dorongan serta mempercepat kesadaran perlunya berdiri sebuah negara Nasional Indonesia. Propaganda Perhimpunan Indonesia serta langkah-langkah yang diambil pimpinannya dengan jelas menentang imperialisme dan kolonialisme di semua forum baik dalam tingkat nasional maupun internasional yang terbukti dengan adanya hubungan antara Perhimpunan Indonesia dengan Liga Anti Penjajahan yang menyebabkan keberanian serta sikap pergerakan nasional yang semakin maju Menuju Indonesia Merdeka merupakan tema pokok, motivasi dasar yang menggerakkan nasionalisme pada waktu itu. Setelah berjuang selama empat tahun di *Volksraad* dengan segala keuletan dan kebijaksanaan menyusun pendapat serta mengkritik Belanda, dirasakan oleh Haji Agus Salim hasilnya tidak memuaskan. Sebenarnya ia selalu percaya dapat mengubah pendirian pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia. Namun harapan ini tidak tercapai dan bahkan sikap Belanda menghadapi kaum pergerakan semakin kejam seperti tindakan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal de Fock. Atas dasar itu Haji Agus Salim memutuskan tidak mau lagi duduk sebagai anggota *Volksraad*, sebab dewan itu hanya merupakan sandiwara yang dipergunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah kolonial Belanda. Bila tetap menerima keanggotaan *Volksraad* justru berarti memperkuat pemerintah kolonial. Sikap Haji Agus Salim yang tegas itu disebut baik oleh Sarekat Islam dan sejak itu Sarekat Islam memutar haluan dari Koperasi menjadi non koperasi yang berarti tidak mau lagi kerja-sama dengan Belanda dalam semua bidang. Demikianlah Haji Agus Salim dengan keputusan yang pasti meninggalkan *Volksraad*.

5.4 Membina Perhimpunan Karyawan

Timbulnya gerakan-gerakan karyawan di Indonesia selain berdasarkan atas kesadaran yang tumbuh di kalangan mereka karena adanya Sarekat Sekerja bangsa Eropa dan keterbukaan

organisasinya juga disebabkan karena hasrat kaum politikus untuk mendekati dan mempengaruhi gerakan ini. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi nya dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda.

Demikianlah pada tahun 1905 berarti perhimpunan karyawan yang pertama yaitu Perserikatan Pegawai Jawatan Kereta Api (*Staats Spoor wegen*) kemudian pada tahun 1908 terbentuklah Perkumpulan Pegawai Angkutan Darat, Kereta Api dan Trem (*Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel*) di Semarang. Semenjak tahun 1913 Hen rik Sne vliet (ISDV) dan kemudian muridnya Semaun sangat berpengaruh dalam perkumpulan ini.

Jika kedua organisasi karyawan itu anggota-anggotanya masih campuran, maka di kalangan karyawan bangsa Indonesia pun tidak mau ketinggalan, sehingga pada tahun 1916 berdirilah Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPB). Sarekat Islam yang sejak semula bergerak di kalangan karyawan selalu memperhatikan perkembangan perserikatan karyawan yang kemudian mempunyai pengaruh dalam PPPB.

Ternyata sejak mula berdirinya Perhimpunan Karyawan telah terjadi persaingan untuk saling menanamkan pengaruh antara ISDV dan Sarekat Islam. Kemenangan Revolusi Oktober 1917 di Rusia di mana kaum buruh memegang peranan penting menyebabkan golongan Marxis di Indonesia berusaha mempersatukan perhimpunan karyawan atau buruh. Sehingga tidaklah mengherankan kalau Semaun berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan perkumpulan itu. Usaha Semaun tahun 1918 di Semarang ini, mengalami kegagalan karena PPPB tidak bersedia menggabungkan diri.

Sesudah sukses sebagai penasehat NVV di Jenewa, maka ia diundang ke negeri Belanda dan dalam perlawatan itu dia berusaha untuk membicarakan lebih lanjut tentang janji pinjaman jangka panjang dari NVV untuk pembelian mesin percetakan

guna mencetak harian *Fajar Asia*. Selain itu juga untuk mengadakan diskusi-diskusi dengan anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang diharapkan oleh NVV untuk dapat meredakan pertentangan yang terjadi antara Perhimpunan Indonesia dan SDAP (*Socialistische Democratische Arbeid Partij*). . Pertentangan itu disebabkan karena SDAP menolak tuntutan Perhimpunan Indonesia tentang Indonesia Merdeka sekarang juga. SDP berpendapat bahwa untuk mencapai kemerdekaan maka harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan-persyaratan minimal, yaitu harus dicapai suatu tingkat kemajuan terlebih dahulu supaya dapat sanggup ikut serta dalam percaturan internasional dengan penuh tanggungjawab. Persoalan ini bagi Perhimpunan Indonesia ialah siapa yang menentukan hal itu. Kalau pemerintah Belanda yang memastikan maka tidak akan terwujud kemerdekaan, karena itu Perhimpunan Indonesia menentang keras sikap yang demikian. Serangan Perhimpunan Indonesia terhadap SDAP tentang tanah jajahan tadi sangat merisaukan pimpinan partai tersebut sebab hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di lingkungan pengikutnya. Sehubungan dengan hal itu Haji Agus Salim diminta jasa baiknya untuk melunakkan tuntutan Perhimpunan Indonesia tadi. Tetapi ternyata bahwa setelah mengadakan diskusi-diskusi justru Haji Agus Salim malahan cenderung pada pendirian Perhimpunan Indonesia. Dalam pembicaraan-pembicaraan, rapat-rapat serta tulisan-tulisannya dalam majalah *De Socialist*., Haji Agus Salim mengemukakan, hendaknya pimpinan SDAP dan NVV membedakan antara fakta dan norma. Sebagai fakta benar bahwa Indonesia merdeka tidak dapat dicapai sekarang, namun sebagai norma dapat dikehendaki, karena itu merupakan suatu pengakuan atas hak asasi. hak tiap-tiap bangsa untuk menentukan kemerdekaannya. Hanya kaum kapitalis dan imperialis dapat menolak hak asasi itu tetapi bagi seseorang sosialis tidak mungkin.

Pendapat tegas dari Haji Agus Salim tersebut menimbulkan reaksi tajam dari pimpinan SDAP dan NVV sehingga hubungannya dengan Haji Agus Salim menjadi renggang. Sebagai kons-

kuensinya dari ketegasan pendirian itu Haji Agus Salim kembali ke tanah air tanpa dapat realisasi dari janji subsidi jangka panjang itu. Tetapi Haji Agus Salim tidak mengacuhkan keputusan itu dan memang keyakinan tak dapat diperjual-belikan.

5.5 Sebagai Pemimpin Surat Kabar dan Pembinaan Organisasi Pemuda

Seperti diketahui bahwa Haji Agus Salim terjun pertama kali dalam dunia Pers ialah semenjak memangku jabatan sebagai wakil redaksi harian *Neraca* pada tahun 1917. Dalam perkembangannya dia berhasil menduduki pimpinan tertinggi, yaitu sebagai ketua redaksi yang dipegangnya sampai permulaan tahun 1920. Ia banyak menulis terutama mengenai kemajuan bahasa yang harus dicapai dengan perjuangan, perkembangan organisasi wanita serta kelemahan dan kelicikan pemerintah Belanda yang diulasnya secara tajam. Ia terpaksa keluar dari harian itu karena adanya pengawasan dan larangan dari pemilik surat kabar tersebut untuk selalu mengikuti garis-garis kebijaksanaannya. Hal ini tidak dapat diterima karena garis-garis kebijaksanaan itu bertentangan dengan hati nurani Haji Agus Salim. Diharapkan oleh pemiliknya bahwa surat kabar itu harus menjadi terompet pemerintah Belanda. Dengan sendirinya surat kabar itu menyuarakan kepentingan Belanda dan menekan tuntutan-tuntutan kaum pergerakan. Akibatnya Haji Agus Salim harus mengundurkan diri.

Haji Agus Salim adalah pemimpin Sarekat Islam yang aktif dalam lapangan perburuhan di samping Sosrokardono dan Suryopranoto. Di dalam konggres PPPB di Bandung pada bulan Mei 1919 Sosrokardono menganjurkan adanya fusi di antara sarekat-sekerja sehingga merupakan suatu badan sentral. Sebenarnya usaha dari pemimpin Sarekat Islam itu jelas ialah selain untuk menghindarkan perpecahan juga menunjukkan bahwa Sarekat Islam tidak pro kapitalisme dan bahkan anti kapitalisme, Cara untuk mencapai kemenangan yang diinginkan ialah bukan dengan aksi-aksi kekerasan melainkan dengan jalan mu-

syawarah atau pun melalui protes-protes moral. Atas prakarsa Sarekat Islam pada akhir bulan Desember 1919 di Yogyakarta diadakan rapat untuk membentuk suatu Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dari pelbagai sarekat sekerja. Namun kaum sosialis kiri yang kemudian menjadi komunis menginginkan nama lain yang dianggapnya lebih revolusioner yaitu *Revolusionair Socialistische Vak Centrale*. Nama yang terakhir ini tidak disetujui. Dalam konggres PPKB yang pertama pada tanggal 1 Agustus 1920 terbukti adanya perbedaan antara Sarekat Islam dengan kaum komunis. Jika Sarekat Islam mengharapkan aksi-aksi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi kaum komunis beranggapan bahwa aksi diadakan untuk mendapatkan pengaruh politik. Sampai waktu itu Sarekat Islam masih bersedia bekerjasama dengan bukti personalia susunan pengurus yang terdiri dari Ketua Semaun dan Haji Agus Salim sebagai sekretarisnya. Di sini kelihatan peranan Haji Agus Salim bahwa ia terus aktif didalam pembinaan karyawan terutama untuk mengimbangi pengaruh dari Semaun. Jelas bahwa kerjasama yang dikehendaki kaum komunis itu hanya taktik saja dan tidak mungkin dapat diterima secara terus-menerus, karena itu pada konggres PPKB tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 1921 Yogyakarta yang mengakibatkan perpecahan tak dapat dihindarkan. Kaum komunis kemudian mendirikan gabungan Sarekat sekerja baru dengan nama *Revolutionaire Vak Centrale*.

Dengan keluarnya kaum komunis sesuai dengan adanya disiplin partai dari Sarekat Islam, maka Haji Agus Salim kemudian mengemudikan perhimpunan karyawan yang beraliran Islam, yaitu **Perserikatan Buruh Islam Indonesia**. Demi perkembangan dari perhimpunan ini Haji Agus Salim berusaha membina dalam tubuh organisasi itu agar bersih dari pengaruh komunis dan aktif mengadakan hubungan dengan sarekat sekerja di negeri Belanda yaitu *Nederlands Verbond van Vak Verenigingen* dan *International Verbond van Vak Verenigingen*.

Keahlian Haji Agus Salim akan persoalan-persoalan Indonesia menarik perhatian NVV, sehingga pada tahun 1930 ia diminta untuk menjadi penasehat dalam sidang Biro Internasional Perburuhan di Jenewa. Di dalam sidang itu akan dibahas mengenai *Poenale Sanctie* yaitu suatu perjanjian kontrak antara majikan dan buruh yang apabila pihak buruh melanggar peraturan dikenakan sanksi hukum pidana. Haji Agus Salim menyatakan bersedia menerima tawaran itu dengan mengajukan syarat bahwa sebagai penasehat akan menyusun sendiri pidato yang diucapkan dan pembahasan persoalan itu secara langsung di muka sidang. Syarat yang diajukan itu diterima oleh pihak NVV dan Haji Agus Salim datang di Jenewa tepat pada waktunya. Pada waktu pembicaraan dengan Haji Agus Salim pimpinan NVV, yaitu Kupers meminta naskah pidato Haji Agus Salim yang akan disalin ke dalam bahasa Perancis. Dengan tegas Agus Salim menolak bahwa ia akan berpidato dalam Bahasa Perancis. Untuk pertama kalinya berpidato dalam bahasa Perancis di forum internasional dan ternyata hasilnya mengagumkan. Di sini kemahiran berbahasa Haji Agus Salim terbukti.

Pada tahun 1925 Haji Agus Salim telah diminta untuk memimpin harian *Hindia Baru* di Jakarta. Permohonan ini dikabulkannya. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1927 Haji Agus Salim bersama-sama dengan Tjokroaminoto menerbitkan surat kabar *Fajar Asia*. Dan pada tahun 1931 sampai tahun 1932 Haji Agus Salim menduduki tempat sebagai redaktur dari surat kabar harian *Mustika* di Yogyakarta, yaitu sebuah harian Islam yang terbesar di Indonesia. Di samping itu Haji Agus Salim membuka kantor *Advies en Informatie Bureau Penerangan Oemoem* disingkat AIPO. Sebagai wartawan Haji Agus Salim terkenal dengan karya-karya tulisnya yang tajam isinya dan dalam berbagai harian maupun majalah selalu dia memakai bahasanya yang tersendiri tetapi bahasa ini cukup populer dan mudah dipahami oleh masyarakat pembacanya. Kata-katanya yang sederhana tetapi berjiwa. Karangan-karangan Haji Agus Salim banyak dijumpai dalam pelbagai harian maupun majalah

seperti dalam surat-surat kabar *Neraca*, *Mustika*, *Fajar Asia*, *Hindia Baru*, *Keng Po*, *Dunia Islam*, *Het Licht*, *Pujangga Baru*, *Hikmah*, *Mimbar Agama*, *Moslemse Reveil*, *Indonesian Revue* dan lain-lain.

Biarpun penanyatajam dan kritikannya pedas namun Haji Agus Salim masih mengenal batas-batas serta masih menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Akibatnya kecaman-kecamannya masih dalam lingkup sportivitas dan obyektivitas. Setelah kemerdekaan Haji Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Dewan Kehormatan dalam pengurus Kesatuan Wartawan Indonesia Pusat.

Dalam membina organisasi pemuda Haji Agus Salim tampak sekali usahanya untuk mengerti dan memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh generasi muda pada waktu itu. Antara lain di Negeri Belanda dia dapat menerima pendapat Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Eropa, sampai-sampai dia berani mengorbankan subsidi yang akan diterima dari NVV. Di Indonesia Haji Agus Salim ketika diminta oleh Samsurizal guna membimbing *Jong Islamieten Bond* (JIB) hal ini disambut dengan senang hati sebagai idaman hati. Haji Agus Salim dikonggres JIB I pada tanggal 25 Desember 1926 di Yogyakarta menyatakan bahwa sebenarnya JIB merupakan terlaksananya idaman hati Haji Agus Salim. Bantuan dan dukungannya pada JIB semata-mata sebagai kewajiban orang Islam yang sanggup membantu kaumnya. Di samping itu Haji Agus Salim sangat bersyukur dengan lahirnya JIB karena Agus Salim sangat bersyukur dengan lahirnya JIB karena sudah menjadi bukti kemajuan kebebasan dari para anggotanya. Dipujinya JIB karena berorientasi kepada kepribadian dan jiwa bangsa sendiri yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang dianggap oleh Haji Agus Salim keluar biasaan dari JIB. Antara lain beliau mengatakan , " untuk meningkatkan rakyat sendiri, untuk kita hormati sendiri, untuk meningkatkan rakyat sendiri, untuk kita hormati sendiri. untuk meningkatkan ia (JIB) "

Dalam menegakkan hak emansipasi wanita Haji Agus Salim dalam konggres JIB berpidato dengan topik *De Sluiering en Afzondering der Vrouw* (tentang pemakaian kudung dan pemisahan wanita) di situ Haji Agus Salim menerangkan bahwa sebenarnya wanita dan pria mempunyai hak yang sama. Jadi di dalam rapat-rapat tidak perlu itu diadakan tabir pemisah antara pria dan wanita. Juga kudung sebenarnya adalah adat orang Arab dan sama sekali memakai bukan perintah Tuhan. Malahan Haji Agus Salim pernah merobek tabir di salah satu rapat umum secara terang-terangan dan tindakan semacam itu merupakan keberanian moral yang besar.

Dengan demikian maka Haji Agus Salim bagi golongan pemuda Islam Indonesia merupakan bintang fajar yang akan membawa ke arah modernisasi pendidikan Islam.

BAB VI PERJUANGAN MENJELANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

6.1 *Peristiwa Pada Akhir Pemerintahan Kolonial Belanda*

Makin mendekati keruntuhannya pemerintah Belanda makin kejam sikapnya terhadap pergerakan di Indonesia. Kalau dari pemerintah Belanda Sarekat Islam mendapat tekanan-tekanan maka di dalam tubuh Sarekat Islam sendiri timbul pula peristiwa-peristiwa yang melemahkan kedudukan Sarekat Islam. Pada tahun 1929 bulan Januari Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. pergantian ini disebabkan karena pengaruh Dr. Sukiman yang baru kembali dari Negeri Belanda. Pengaruh Dr. Sukiman ini dalam bidang politik di dalam tubuh pengurus Partai Sarekat Islam Indonesia menimbulkan perselisihan, sehingga timbul dua golongan, yaitu golongan dwi tunggal Tjokroaminoto -- Agus Salim melawan Sukiman -- Suryopranoto. Perselisihan ini terutama disebabkan karena Tjokroaminoto -- Agus Salim menekankan pada asas agama yang akibatnya fokusnya meliputi kepentingan sosial dan politik. Sedangkan golongan Sukiman menghendaki agar Partai Sarekat Islam Indonesia hanya menitik-beratkan pada bidang politik saja.

Pada tahun 1932 ketika Komite Al Islam mengadakan Konggres Al Islam ke IX di Malang atas seruan Mufti Besar S. Amin Al Hussainy, agar mengadakan Mukhtar Alam Islami di Palestina. Dalam kesempatan itu Haji Agus Salim dan Tjokroaminoto berhasil menyampaikan pendapat dan cita-citanya. Akibat pengaruh Haji Agus Salim makin kuat di lingkungan Islam baik di dalam maupun di luar negeri, maka beranilah Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1932 memecat keanggotaan Sukiman. Sebagai tindak balasan Sukiman mendirikan Partai Islam Indonesia (PARII) di Yogyakarta.

Pada tahun 1934 Haji Agus Salim bersama-sama Tjokroaminoto menyusun Manifest Partai Sarekat Islam Indonesia, sayang sekali pada tanggal 17 Desember 1934 Tjokroaminoto wafat. Setahun kemudian dalam konggres Partai Sarekat Islam Indonesia di Malang, Haji Agus Salim terpilih duduk dalam Dewan Partai Sarekat Islam Indonesia. Dalam perjalanan hubungannya dengan pemerintah Belanda dipandang perlu oleh Haji Agus Salim untuk melepaskan diri dari sikap non kooperasi menjadi kooperasi. Pandangan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa pada waktu itu telah timbul Nazi Jerman, Fasis Italia dan Fasisme Jepang yang menyulut Perang Dunia II. Karena itu bagi Haji Agus Salim perlu kerjasama dengan Belanda untuk menolak fasisme tadi, karena disadarinya bahwa fasisme lebih kejam dari pada penjajahan Belanda. Untuk itu Haji Agus Salim bersama-sama Sangadji mendirikan Komite dengan tujuan menolak sikap non kooperasi dari Partai Sarekat Islam Indonesia. Akibatnya golongan koperator yang berada di belakang golongan Haji Agus Salim semakin besar sehingga timbulah kelompok yang menamakan dirinya **Barisan Penyedar** Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan tujuan menyadarkan Partai Sarekat Islam di Indonesia bahwa kehendak jaman itu sudah berubah. Tetapi akibatnya Haji Agus Salim dan Sangadji dipecat dari partai oleh pusat pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia. Dengan demikian maka Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1937 pecah menjadi tiga bagian yaitu: Partai Sarekat

Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan Penyedar.

Dengan lahirnya Penyedar maka Partai Sarekat Islam Indonesia pada konggresnya di Bandung 1937 mengambil keputusan di antaranya mencabut pemecatan atas diri anggota-anggotanya yang dalam tahun 1932 dikeluarkan dari Partai Sarekat Islam Indonesia dan yang sudah mendirikan Partai Islam Indonesia. Hal ini memang dimungkinkan sebab Haji Agus Salim sudah dienyahkan dari Partai Sarekat Islam Indonesia dan Tjokroaminoto sudah wafat. Akibat kongres ini maka pada tanggal 17 September 1937 Sukiman cs. kembali ke dalam Partai Sarekat Islam Indonesia. Tetapi setahun kemudian pada kongres Partai Sarekat Islam ke XXIV pada tahun 1938 di Surabaya, Kartosuwiryo menjelaskan bahwa hijrah menjadi sikap Partai; di samping itu pada kongres tadi Sukiman cs. juga tidak diberi tempat di puncak pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia. Akibatnya pada Bulan Desember 1938 Sukiman cs. meninggalkan kembali Partai Sarekat Islam Indonesia dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) di Solo. Di muka telah diuraikan bahwa pada masa awalnya golongan Muhammadiyah pun telah meninggalkan Sarekat Islam, ditambah lagi JIB yang sudah dipengaruhi Haji Agus Salim maka mereka membentuk pimpinan Partai Islam Indonesia. Jelaslah sudah bahwa Partai Islam Indonesia memungkinkan timbulnya ide politik yang tidak sama dengan daya upaya politik Partai Sarekat Islam Abikusno dan Penyedar nya Haji Agus Salim. Antara lain program Partai Islam Indonesia adalah mendirikan negara Kesatuan Indonesia yang diperintah oleh pemerintah pusat.

Kekacauan di Pengurus Besar Partai Sarekat Islam Indonesia ini memuncak ketika pada tanggal 30 Januari 1939 Partai Sarekat Islam memecat Kartosuwiryo. Kejadian ini menyebabkan Kartosuwiryo mendirikan Partai Sarekat Islam tandingan. Dengan demikian maka Partai Sarekat Islam Indonesia pecah menjadi empat yakni:

- a. Partai Sarekat Islam Indonesia Abikusno

- b. Partai Sarekat Islam Indonesia Kartosuwiryo
- c. Partai Islam Indonesia Sukiman
- d. Penyedat Haji Agus Salim

Sejak awal tahun 20-an diproklamasikan cita-cita Indonesia Merdeka oleh Perhimpunan Indonesia, baru pada pertengahan tahun 30-an cita-cita itu diwujudkan dalam perjuangan politik di gelanggang *Volksraad*.

Pada tahun 1936 muncullah Petisi Sutarjo yang mengusulkan suatu konperensi wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan perubahan yang dalam 10 tahun mendatang dapat memberi status merdeka kepada Indonesia. Haji Agus Salim menyetujui isi petisi ini. Juga disarankan kepada Sutarjo cs. agar membentuk suatu organisasi yang berusaha untuk mendapatkan sokongan dari segala pihak agar usul Indonesia Merdeka dapat dicapai. Pada tanggal 4 Oktober 1937 dibentuklah *Centraal Comité Pertitie* Sutarjo atau CCPS. Dalam komite ini duduk pula Haji Agus Salim di samping Sutarjo, Mr. Sartono, I.J. Kasimo dan lain-lain. Sayang sekali Gerindo, Partai Sarekat Islam Indonesia, Parindra dan PNI Baru menolak petisi tersebut. Meskipun demikian petisi itu tetap disokong oleh PBBB, Chung Hua Hui, IEV, PEB, Penyedat, Pasundan, PPKI, PAI dan Perseikatan Indonesia serta beberapa Nasionalis lain. Juga Sarekat Ambon dan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia menyetujui Petisi Sutarjo ini. Agaknya pemerintah kolonial Belanda tetap berkepala batu karena itu pada tahun 1939 Petisi Sutarjo ditolak, yang mengakibatkan CCPS membubarkan diri pada tanggal 11 Mei 1939.

Dengan dibubarkannya CCPS maka Husni Thamrin ketua departemen politik Parindra mulai menghubungi pimpinan pergerakan nasional guna pembentukan Badan Konsentrasi Nasional. Rencana itu diuraikan oleh Husni Thamrin kepada Haji Agus Salim. Ternyata Haji Agus Salim yang selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan berdasarkan musyawarah dan memang berpolitik evolusioner, dapat menerima rencana dari

Husni Thamrin ini. Namun ketika Badan Konsentrasi Nasional ini akan dibentuk ternyata Partai Sarekat Islam Abikusno menyatakan tidak akan ikut dalam program tadi, apabila pergerakan Penyebar yang dipimpin oleh Haji Agus Salim ikut duduk dalam Badan Konsentrasi Nasional itu. Demikian pula dengan Gerindo juga tidak bersedia ikut Badan Konsentrasi Nasional bila Muhammad Yamin diikutsertakan. Pada tanggal 21 Mei 1939 lahirlah Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dengan sekretaris tetap Abikusno, Husni Thamrin dan Amir Syarifudin.

Karena pergerakan Penyebar tidak diikuti sertakan, maka Haji Agus Salim menyangsikan akan kelangsungan hidup partai-partai politik hanya pandai merebut kursi dalam dewan-dewan dan pengaruh partai terlalu kecil di mata rakyat. Hal inilah yang menyebabkan pergerakan Penyebar tidak setuju membawa nama partai, apalagi nama bangsa Indonesia dalam suatu perikatan yang hanya menghimpun beberapa orang tokoh yang hanya menghendaki pikirannya sendiri, sehingga melupakan ciri khas bangsa Indonesia yang menonjol, yaitu musyawarah dan mufakat. Pergerakan Penyebar menolak GAPI dan bertekad bekerja dalam lingkungan rakyat, bersama rakyat, dan demi kepentingan rakyat agar ada peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan. Uraian Haji Agus Salim ini ditulis dalam buku karangannya dengan judul *Pergerakan Politik di Indonesia* pada tahun 1939. Sebenarnya gelora hati Agus Salim sudah dituangkan dalam karya tulisannya dengan judul *Pergerakan* pada tahun 1936.

Pada tahun 1939 politik kolonial Belanda mulai melaksanakan perubahan pemerintahan berdasarkan rencana tahun 1922 dan kelanjutan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Tindakan mereka diwujudkan dengan mendirikan propinsi dan dewan propinsi. Pada waktu yang baik ini usaha partai-partai politik untuk menggalang persatuan tidak berhasil, karena perorangan pimpinan partai-partai itu mempunyai prinsip yang berbeda dan tidak kenal persatuan. Akibatnya ketika GAPI masih sibuk untuk menyarankan pembentukan parlemen ternyata pada tanggal 16 Oktober 1939 Gabungan Nasional Indo-

nesia yang dipimpin oleh Muhammad Yamin didukung oleh Partindo mengirimkan permohonan pembentukan parlemen pada *Staten General* di Negeri Belanda. Karena pemerintah Belanda tahu perselisihan antara GAPI dan Gabungan Nasional Indonesia itu maka Belanda menolak dilaksanakan gagasan Indonesia Berparlemen pada tanggal 10 Februari 1940.

Bila suasana politik di Indonesia dipenuhi dengan hantaman-hantaman antara saudara-saudara sendiri, maka Haji Agus Salim mulai menari diri dari kalangan politik. Malahan pada tahun 1939 Haji Agus Salim bekerja menjadi penasehat Bagian Ketimuran di *Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM) dan pada tahun 1940 Haji Agus Salim menjadi pembantu *Regeerings Publiciteit Dienst* (RPD).

6.2 *Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945*

Akhir pemerintahan Belanda ditandai dengan penyerahan Hindia Belanda pada Bala Tentara Jepang di Kalijati. Penindasan Jepang terhadap bangsa Indonesia melebihi penindasan Belanda. Hal inilah yang pada awalnya sudah disadari oleh Haji Agus Salim. Karena itu untuk menghindari agar anggota pergerakan Penyedar tidak menerima efek yang tidak baik maka Haji Agus Salim membubarkan pergerakan Penyedar. Untuk mengelabui Jepang Haji Agus Salim bekerja di salah satu kantor Jepang dalam bidang penterjemahan. Baru ketika diadakan organisasi Putera, yaitu singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat karena desakan Bung Karno Haji Agus Salim ikut menjadi anggotanya. Memang Haji Agus Salim mulai pergerakan politiknya pada jaman Jepang dengan cara langkah demi langkah dan perlahan-lahan.

Baru pada masa ketika diadakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar, Agus Salim ikut serta sebagai anggotanya. BPUPKI beranggotakan 60 orang kecuali ketua, antara lain ialah: Ir. Sukarno, Mr. Muh. Yamin, Dr. R. Kusumaadmojo, Abdul Rahim Pratalikrama, R. Azis, Ki Hajar

Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, BPH Bintoro, AK. Muzakir, P.B.H. Purubaya, R.A.A. Wiranatakusuma, Ir. R. Ashar Sutejamunandar, Oey Tiang Chu, Drs. Moh. Hatta, Ui Tjong How, **Haji Agus Salim**, M. Sutarjo Kartahadikusumo, R.M. Margono Joyohadikusuma, K.H. Abdul Halim, K.H. Maskur, Sudirman, Prof. Dr. Husein Jayadiningrat, Prof. Mr. Dr. Supomo, Prof. Ir. Roseno, Mr. Panji Singgih, Mr. Ny. Maria Ulfa Santosa, R.M. Suryo, R. Roslan Wongsokusumo, Mr. R. Susanto Tirtoprojo, Ny. Sunaryo Mangunpuspita, Dr. R. Bintaran Martaatmojo, Liem Kun Hian, Mr. J. Latuharhary, Mr. R. Hendromartono, R. Sukarjo Wiryopranoto, H. Sanusi, A.M. Dasaat, Mr. Tan Eng Ho, Ir. R.M.P. Surahman Tjokrodisuryo, R.A.A. Sumitro Kulupaking Purbanagoro, K.R.M.T.H. Wuryaningrat, Mr. A. Subardjo, Prof. Dr. R. Zaenal Asikinwijayakusuma, Abikusno Cokrosuyoso, Parada Harahap, Mr. R.M. Sartono, K.H.M. Mansur, Drs. Kusumososrodiningrat, Mr. R. Suwandi, K.H.A. Wachid Hasyim, P.F. Dahler, Dr. Sukiman, Mr. Wangsonagoro, Otto Iskandardinata, A. Baswedan, Abdul Kadir, Dr. Syamsi, Mr. A.A. Maramis, Mr. R. Syamsudin, dan Mr. R. Sastromul-yono.

Ketua BPUPKI ini ialah Mr. Radjiman Widyodiningrat sedangkan Ketua Muda Ici Bangase (bangsa Jepang) dan R.P. Suroso merangkap Kepala Tata Usaha. BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan rapat dua kali yakni tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan rapat kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945.

Sidang pertama khusus membahas Dasar Negara. Pada sidang ini terdapat dua kelompok yang pertama menghendaki Dasar Negara Islam, sedangkan kelompok yang kedua menghendaki Dasar Negara Kebangsaan. Pada tanggal 1 Juni hari terakhir dari rapat pertama ini Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya tentang Dasar Negara yang terdiri dari lima sila dan diberi nama Pancasila. Pidato ini terkenal kemudian dengan nama Lahirnya Pancasila. Dalam sidang pertama ini BPUPKI secara bulat

menerima perumusan Pancasila tersebut. Dalam sidang kedua dibahas rancangan Undang Undang Dasar. Sidang ini dibagi dalam tiga panitia, yakni Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Ir. Sukarno; Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dan Panitia Perekonomian serta Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.

Haji Agus Salim termasuk anggota yang bertugas merancang Undang Undang Dasar di bawah pimpinan Ir. Sukarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini kemudian membentuk Panitia Kerja yang diketuai oleh Mr. Supomo dan terdiri dari tujuh orang termasuk sebagai anggotanya ialah Haji Agus Salim.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bertugas menyiapkan draf Undang-Undang Dasar yang kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa, terdiri dari tiga orang, yakni Mr. Supomo, Haji Agus Salim dan Husein Jayadiningrat. Mengapa Agus Salim ditugaskan di sini? Sebenarnya karena pada tanggal 20 Oktober 1943 kantor pengajaran Jepang di Jawa mendirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia atas desakan beberapa tokoh di Indonesia. Tugas komisi itu adalah menentukan terminologi yaitu istilah-istilah modern serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Susunan anggota Komisi Bahasa Indonesia itu antara lain adalah Haji Agus Salim cs. Jadi sudah sewajarnya apabila Haji Agus Salim menjadi anggota Panitia Penghalus Bahasa.

Rancangan Undang-Undang Dasar itu dilaporkan kepada sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam rapat itu Wachid Hasyim mengusulkan agar ditambahkan : . . . yang beragama Islam. . . . pada pasal 4 ayat 2. Sehingga pasal 4 ayat 2 itu berbunyi: "Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam" Menurut pengusul, hal itu dengan tujuan agar perintah-perintahnya berbau Islam, sehingga besar pengaruhnya. Sedangkan pada pasal 29 disarankan agar diubah menjadi: "Aga-

ma Negara ialah agama Islam dengan menjamin kemerdekaan kepada mereka yang beragama lain. Tetapi kedua usul itu telah ditolak oleh Haji Agus Salim bersama-sama Husein Jayadiningsrat, Wongsonagoro dan Otto Iskandardinata. Akibatnya pasal 4 ayat dua itu dihapus sama sekali sedangkan pasal 29 diubah menjadi dua ayat dan sama sekali tidak menyebutkan bahwa agama Negara adalah agama Islam.

Ketika pekerjaan BPUPKI telah selesai maka persoalan Kemerdekaan Indonesia telah meningkat ke arah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI dibubarkan tanggal 6 Agustus 1945 sedangkan PPKI anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia yang diangkat oleh pucuk pimpinan pemerintahan *Dai Nippon* di wilayah selatan dengan tempat sidang ditetapkan di Jawa.

PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno diwakili oleh Drs. Moh. Hatta dan direncanakan mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. Tetapi karena perubahan jaman dan penyerahan Jepang tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 diteruskan dengan Proklamasi berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal itu juga disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang terkenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali itu dipilih pula Ir. Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Pada hari itu juga dikeluarkan undangan rapat tanggal 19 Agustus kepada semua anggota PPKI yang terdiri dari 13 orang dari Jawa, tiga orang dari Sumatra dan lima orang dari daerah lain. Dalam rapat tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan mengenai daerah pemerintahan dan pertahanan. Sedangkan pada tanggal 25 Agustus 1945 anggota Komite Nasional Pusat dilengkapi menjadi 136 orang dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada tanggal 25 Septem-

ber 1945 Presiden mengangkat anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang berjumlah 11 orang, antara lain ialah: Radjiman Widyodiningrat, Syeh Jamil Jambek, **Haji Agus Salim**, Wuryaningrat, H. Adnan, Margono Joyohadikusumo, Mohamad Enoch, Dr. Latumeten, Ir. Pangeran Moh. Nur, Dr. Sukiman Wirjosanjoyo dan Ny. Suwarni Pringgodigdo.

Dengan demikian pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan serta awal pelaksanaannya telah terlaksana. Di sini ternyata bahwa peranan Haji Agus Salim juga tidak kecil, pantaslah bila dia diberi gelar *The Grand Old Man*.

6.3 *Peranan Haji Agus Salim dalam Jakarta Charter*

Antara sidang pertama BPUPKI dan sidang kedua, bertemulah panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abukisno Cokroyoso, Abdul Kaharmujakir, **Haji Agus Salim**, Mr. Ahmad Subarjo, Wachid Hasyim dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini membuat naskah yang merupakan balasan terhadap siasat Jepang dengan BPUPKI untuk memenuhi janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari.

Naskah itu dikenal dengan nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Sebenarnya naskah itu tidak ada namanya tetapi yang memberi nama itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Wujud Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rakhmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Ne-

gara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Waktu penanda-tanganan Piagam Jakarta ini Haji Agus Salim berpendapat lebih baik prinsip” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. . .” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab ini bukan suatu kebetulan yang diterima dan bukan untuk mengelakkan pertentangan dia mengatakan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti kemahakuasaan Tuhan dan ini terkandung di dalamnya pengakuan manusia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Haji Agus Salim pun menolak kata jihad dalam arti perang suci melawan orang-orang kafir dan ia pun tidak menyetujui theokrasi Islam. Sebenarnya hal ini memang sudah sejak dahulu tertanam dalam jiwa Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak pernah mengatakan atau menamakan asas, sikap, pendirian, serta gerak usahanya dalam politik itu sebagai politik Islam. Adalah menjadi keyakinan Haji Agus Salim yang semakin-yakinnya bahwa yang benar, yang hak di alam semesta ini adalah datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dalam tafsir program asas Serikat Islam pun yang hingga dewasa ini menjadi pegangan dalam Partai Sarekat Islam itu tidaklah disebutkan perihal kehausan membentuk negara islam. Yang ada hanyalah keharusan mencapai kemerdekaan umat. Tentang sifat negara dikatakan dalam tafsir atas program asas itu bahwa negara Indonesia Merdeka,

yang kaum Sarekat Islam wajib berusaha akan mencapai pemerintahannya haruslah bersifat demokratis.

Jadi jelas bahwa Haji Agus Salim bertitik-tolak demi kepentingan Bangsa dan Negara, maka beliau berani mengajukan usulnya kepada Panitia sembilan yang merupakan *The Founding Fathers* dari Piagam Jakarta. Tetapi pendapat ini tidak dapat diterima oleh Panitia sembilan. Ketika sidang ke II BPUPKI maka *Jakarta Charter* ini langsung dijadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Anak kalimat sila pertama dari Pancasila yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Dasar atau *Jakarta Charter* itu yang berbunyi : "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah hasil kompromi antara dua golongan pada rapat Panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Karena anak kalimat itu memberikan jaminan dan peluang kepada kaum muslimin untuk menegakkan syari'at Islam dalam Negara yang akan dibentuk.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari Drs. Mohamad Hatta menerima seorang opsir Kaigun. Tamu ini memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil-wakil golongan yang bukan beragama Islam dan penganut aliran kepercayaan dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat keberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi : "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka yang bukan beragama Islam dan kalimat itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam, tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu didalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar, berarti hal ini mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas.

Jika diskriminasi itu ditetapkan juga maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Sebenarnya keberatan

terhadap anak kalimat tadi tidak hanya dari golongan minoritas saja, tetapi juga dari golongan nasionalis. Keberatan golongan nasionalis terhadap kata-kata itu berpokok pada dua macam. Pertama dengan pencantuman yang demikian itu dirasakan seperti di dalam negara Republik Indonesia itu ada diskriminasi keagamaan. Kedua dengan pencantumannya itu terasa seperti negara Republik Indonesia hendak mencampuri urusan agama, khususnya agama Islam. Pernyataan opsir tadi benar-benar mempengaruhi pandangan Bung Hatta, sehingga ia merenungkan sejenak apakah perjuangannya lebih dari 25 tahun itu dengan melalui penjara dan pembuangan akan sia-sia saja ? Apakah Indonesia yang baru saja lahir akan terpecah belah ?

Akibatnya esok paginya tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai, maka Drs. Moh. Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hassan dari Sumatra mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Agar jangan Indonesia pecah sebagai bangsa, maka terpaksa mereka kembali meninjau hasil sidang tanggal 22 Juni 1945, dan mereka kini mengakui bahwa pendapat Haji Agus Salim pada sidang Panitia sembilan dahulu yang melahirkan *Jakarta Charter* ternyata betul. Akibatnya kini pendapat Haji Agus Salim itu diterapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam formula Pancasila yang otentik, yuridis, formal dan konstitusional.

Dengan demikian nyata sudah bahwa peranan Haji Agus Salim dan jasanya dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dihapus.

BAB VII PENGABDIAN DI MASA PERMULAAN REPUBLIK INDONESIA

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyebabkan meletusnya api revolusi yang membakar seluruh bumi Nusantara. Perebutan-perebutan senjata dari tangan Jepang dan perjuangan bangsa Indonesia menolak hadirnya kembali imperialisme Barat di bumi Indonesia, menyebabkan perlu adanya Angkatan Bersenjata yang kuat dan pemerintahan yang mampu mengkonsolidasi masyarakat yang bernegara dan menegara.

7.1 *Haji Agus Salim Terjun Dalam Pemerintahan*

Pada tanggal 23 Agustus 1945 dibentuklah Badan Pusat Komite Nasional Indonesia yang disingkat dengan KNIP. KNIP ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dan merupakan penjelmaan dari PPKI, lagi pula telah ditambah keanggotaannya sehingga berjumlah 136 orang yang diketahui oleh Mr. Kasman Singodimejo. Rentetan dari peristiwa selanjutnya, yaitu lahirnya Kabinet Presidensial, suatu kabinet pertama di Negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet pertama ini terdiri dari 11 Kementerian Sedangkan untuk melengkapi bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 16, maka pada tanggal 25 September 1945 Presiden telah mengangkat

para anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang berjumlah sebelas orang, di antaranya ialah Haji Agus Salim. Badan ini mempunyai kewajiban menjawab pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul pada pemerintah.

Sebelum peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 September 1945 telah ditetapkan Merah Putih sebagai Bendera Indonesia dan dikibarkan mulai tanggal tersebut. Sedangkan salam nasionalnya ialah **Merdeka**, salam inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam pergolakan revolusi. Salam Merdeka menjadi modal perjuangan yang terus menerus mengingatkan bangsa Indonesia pada perjuangan yang telah lampau dan yang sedang dihadapi. Dengan demikian maka salam Merdeka merupakan jembatan yang menghubungkan masa lampau dan yang akan datang. Dalam pidatonya tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno mencita-citakan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal dengan tujuan menyelenggarakan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur serta berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi berhubung pentingnya pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, maka terpaksa persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia itu ditunda.

Atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidang plenonya pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkanlah Maklumat Nomor : x dari wakil Presiden Republik Indonesia yang memberikan kekuasaan legislatif dan wewenang ikut serta menetapkan Haluan Negara dalam Garis-garis Besarnya atau GBHN kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbentuk.

Pada tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia yang isinya pencabutan diadakannya gerakan Rakyat Nasional yang disebut Partai Nasional Indonesia dan sebagai penggantinya dianjurkan pembentukan partai-partai dengan tujuan menghindarkan pertumbuhan kediktatoran. Akibat dari lahirnya partai-partai yang seperti jamur

dimusim hujan itu mengakibatkan timbulnya kabinet Parlemen-ter pertama dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Pemerintah Republik Indonesia yang awalnya berpusat di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena keadaan di Jakarta tidak aman, sedangkan Yogyakarta dianggap lebih aman.

Pada tanggal 2 Maret 1946 Kabinet Syahrir I jatuh. Kemudian lahirlah Kabinet Syahrir ke II yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946 dan di dalam Kabinet Sutan Syahrir ke II inilah Haji Agus Salim mulai berkecimpung secara aktif dalam bidang politik pemerintahan Republik Indonesia. Kekuasaan Belanda semakin bertambah luas sebab Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang diserahkan oleh Inggris kepada Belanda.

Mega mendung kian meliputi udara Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 1946 Sutan Syahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusuma, Dr. Sumitro dan Mayjen Sudibyo diculik dari kota Solo. Dengan demikian terpaksa Presiden mengambil alih kekuasaan pemerintah dan atas seruan Presiden mereka yang diculik dikembalikan pada tanggal 21 Juli 1946.

Di waktu kevakuman itu golongan anti Syahrir pada tanggal 3 Juli 1946 menyerahkan susunan Dewan Pimpinan Politik dan Dewan Kementerian Negara kepada Presiden agar disahkan. Tetapi Presiden tidak mau menanda-tangani, malahan Presiden Sukarno mengumumkan bahwa Tan Malaka, Mr. Subardjo, Mr. Iwan Kusuma Sumantri, Mr. Muh. Yamin dan Sukarni akan merebut kekuasaan Negara. Suasana hangat itu baru tenang kembali pada tanggal 2 Oktober 1946.

Akibatnya Presiden Sukarno menunjuk Sutan Syahrir untuk ke tiga kalinya memimpin kabinet. Dengan demikian lahirlah Kabinet Syahrir yang ketiga yang terdiri dari 31 Kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dipegang sendiri oleh Sutan Syahrir, sedangkan Menteri Muda Luar Negeri diserahkan kepada Haji Agus Salim.

Pada tanggal 15 Nopember 1946 lahirlah Perjanjian Linggarjati yang mempunyai implikasi terhadap kabinet. Dalam sidang kabinet tanggal 26 Juni 1947 golongan sayap kiri yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin tidak menyetujui kompromi yang terkandung dalam surat menyurat antara Delegasi Indonesia dan Komisi Jendral. Akibatnya Kabinet Sutan Syahrir ke tiga berantakan dan karena sikap Amir Syarifuddin itu Partai Sosialis pecah menjadi dua, yaitu golongan Syahrir yang menamakan dirinya Partai Sosialis Indonesia, (PSI) sedangkan golongan Amir Syarifuddin menyebutkan dirinya Partai Sosialis, yang lebih terkenal sebagai partai sosialis kiri dan kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dalam Front Demokrasi Rakyat.

Pada masa inilah Republik Indonesia mengirimkan misi persahabatan ke negara-negara Islam yang dipimpin oleh Haji Agus Salim pada tanggal 4 April 1947.

Akibat usaha Haji Agus Salim ini negara-negara Islam mengakui Republik Indonesia secara *de jure*. Pada tanggal 10 Juni 1947 Haji Agus Salim menanda-tangani persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir di Kairo yang terdiri dari lima pasal dan ditulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Perancis, Arab dan Indonesia. Perjanjian persahabatan itu ditanda tangani oleh Haji Agus Salim sebagai wakil Republik Indonesia dan yang mengetahui delegasi tadi, sedangkan pihak Mesir ditanda-tangani oleh M.F. Nokrasyi sebagai wakil dari pemerintah Mesir. Kecuali Mesir mengakui *de jure* Republik Indonesia juga Mesir mengadakan perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Delegasi Republik Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Republik Siria. Perjanjian diplomatik dengan Suriah itu juga mengakui secara *de jure* adanya Republik Indonesia. Perjanjian ini ditanda-tangani pada tanggal 2 Juli 1947. Republik Siria diwakili oleh Jamil Mardam Bey sebagai Menteri Luar Negeri Suriah. Perjanjian dengan Siria ini persis seperti perjanjian RI – Mesir, hanya tidak ada perjanjian tentang perniagaan. Perjanjian ini

juga diratifikasi oleh Komite Kerja Pusat Parlemen Sementara RI dan disiarkan dalam Lembaran Negara tahun 1948. Sedangkan usaha Haji Agus Salim ke Yordania belum menghasilkan pengakuan dari Yordania, demikian pula dengan Irak. Sedangkan Libanon dan Saudi Arabia mengakui *de jure* Republik Indonesia. Perjanjian dengan Saudi Arabia ditanda-tangani pada tanggal 21 Nopember 1947 yang juga mengakui *de jure* Republik Indonesia. Kerajaan Yaman dan Afganistan juga mengakui *de jure* Republik Indonesia. Dengan demikian maka misi Agus Salim sampai pertengahan Desember 1949 berhasil mendapatkan *de jure* dari negara-negara Islam.

India dan Pakistan hanya mengakui *de facto* saja.

Tanggal 30 Juni 1947 Presiden Sukarno menunjuk Amir Syarifuddin, Sukiman, A.K. Gani dan Setiadjit sebagai formatur kabinet koalisi. Baru pada tanggal 3 Juli lahirlah Kabinet Amir Syarifuddin yang pertama, di mana Haji Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pendekatan antara Belanda dan Indonesia tidak membawa hasil yang baik, akibatnya Belanda melaksanakan agresi militer yang pertama.

Berhubung pada tanggal 12 Agustus akan diadakan sidang Dewan Keamanan guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan agar mengijinkan Menteri Luar Negeri RI Haji Agus Salim dan penasehatnya St. Syahrir untuk menghadiri persidangan guna memberikan keterangan-keterangan seperlunya. Karena perundingan tentang pertikakain antara Indonesia - Belanda adalah soal mati atau hidupnya Republik Indonesia. Mengapa justru Haji Agus Salim yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia ? Hal ini disebabkan bukan hanya karena Haji Agus Salim adalah Menteri Luar Negeri, tetapi juga karena beliau pernah menjadi anggota Indonesia ke *Inter Asia Relations Conference* di New Delhi pada tanggal 23 Maret 1947.

Sejak Belanda mulai dengan aksi militernya yang pertama,

Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim telah meninggalkan Indonesia dengan naik kapal terbang Da kota milik seorang saudagar Pat Naik dari India ke Singapura untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke India, Inggris dan Amerika. Atas permintaan Republik Indonesia itulah maka Haji Agus Salim cs. diijinkan untuk men ghadiri Persidangan Dewan Keamanan tanggal 12 Agustus 1947.

Dalam persidangan itu setelah diadakan pemungutan suara dengan berkesudahan 8 setuju dan 3 tidak setuju, maka wakil-wakil Indonesia di perkenankan mengikuti sidang Dewan Keamanan. Delapan Negara yang menyetujui tadi adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Polandia, Australia, Cina Siria, Kolombia dan Brazilia. Sedangkan tiga negara yang tidak setuju ialah Inggris, Perancis dan Belgia.

Dalam sidang tadi dibicarakan pembentukan sebuah komisi yang akan dikirimkan ke Indonesia atas usul Australia. Wakil Belanda sangat menentang bila wakil Republik Indonesia diberi kesempatan memberikan keterangan-keterangan dalam sidang Dewan Keamanan. Tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa justru Republik Indonesia perlu memberikan penjelasan.

Dalam sidang tanggal 14 Agustus 1947 Soviet Unie menegaskan bahwa Wakil Indonesia Timur dan Borneo tidak dapat memberikan suara dari rakyat yang bebas, sebab buktinya Perdana Menteri Indonesia Timur Najamudin menyetujui tindakan militer Belanda, sedangkan tindakan militer itu berarti perang. Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir diberi ijin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan di Indonesia selaku duta Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan ini. Tanggal tersebut adalah tonggak sejarah bagi Republik Indonesia di dunia internasional terutama dalam forum PBB, karena bantuan negara-negara yang bersimpati pada Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1947 wakil pemerintah Belanda membantah keterangan Syahrir dan menyalahkan Dewan Keamanan. Tangkisan Syahrir diucapkan pada sidang Dewan Keamanan

tanggal 17 Agustus 1947. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1947 sekali lagi wakil Belanda menuduh Dewan Keamanan menyerahkan berjuta-juta rakyat Indonesia kepada Republik yang bukan negara yang sah.

Tetapi tuduhan Belanda ditolak oleh Syahrir pada tanggal 26 Agustus 1947, malahan Syahrir meminta kepada Dewan Keamanan untuk mengirimkan Komisi Internasional guna mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Akhirnya Dewan Keamanan menentukan dua keputusan yaitu :

- a. Konsul-konsul Jendral di Jakarta supaya memberikan laporan tentang pelaksanaan gencatan senjata di Indonesia serta menyebutkan pihak mana yang tidak menaati peraturan tersebut dan apa alasannya mereka berbuat demikian.
- b. Baik Belanda maupun Republik Indonesia memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian antara sengketa Indonesia — Belanda.

Akibat keputusan Dewan Keamanan ini maka pada tanggal 6 September 1947 Kabinet Amir Syarifudin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara atau KTN, Sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai negara ketiga. Pada tanggal 19 September 1947 Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara penggenap dari komisi tiga Negara. Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota KTN datang di Indonesia. Dua hari kemudian mereka menuju Yogyakarta dalam usaha berunding dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa perundingan Indonesia — Belanda yang diawasi oleh KTN akan diadakan di tempat netral yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya diputuskan bahwa perundingan di adakan di kapal perang Renville.

Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Syarifudin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Coa Si Kien, Mr. Moh. Roem, Haji Agus



Haji Agus Salim di tengah-tengah keluarga.

Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda. Sedangkan wakil-wakil Belanda terdiri dari Van Vredenburg, Abdulkadir Wijoyoatmojo. Dr. Sooumokil. Pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen. Sebagai ketua perundingan ialah wakil dari Belgia dan atas usul Australia perundingan itu disebut Perundingan Renville.

Perundingan Renville berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dan menelorkan Perjanjian Renville yang ditanda-tangani oleh Abdul Kadir Wijoyoatmojo sebagai wakil Belanda sedangkan pemerintah Negara Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin. Di antara putusan Perjanjian Renville menentukan baik tentara Belanda maupun Indonesia harus ditarik mundur di belakang garis demarkasi, yaitu daerah kosong (daerah tidak bertuan) dan biasanya disebut daerah/garis status quo. Garis demarkasi itu merupakan batas daerah yang diduduki oleh tentara Belanda di satu pihak dan pemerintah Indonesia di lain pihak, sesuai dengan proklamasi pemerintah Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947. Dalam Perundingan Renville ini Komisi Tiga Negara memberikan sumbangan tentang prinsip tambahan di dalam usaha menyelesaikan politik terutama mengenai soal prosedur pembentukan negara Indonesia Serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan.

Perjanjian Renville tidak membawa kebahagiaan bagi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya. Setelah perjanjian tersebut ditanda-tangani, maka partai Masyumi dan PNI mencabut wakil-wakilnya yang duduk dalam kabinet Amir Syarifudin. Kedua partai itu yang ikut serta bertanggungjawab atas adanya Perjanjian Renville, tetapi pada akhirnya malahan membubarkan kabinetnya sendiri.

Akibatnya karena kegawatan situasi dalam pembentukan kabinet, maka Presiden Sukarno menunjuk Wakil Presiden Mohamad Hatta untuk membentuk kabinet Presidensial. Kabinet Hatta yang pertama ini terdiri dari 17 kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dijabat oleh Hatta sendiri. Sedangkan jabatan Menteri Luar Negeri dipercayakan kepada

Haji Agus Salim. Menteri-menteri yang duduk di dalam kabinet ini ialah tokoh-tokoh Masyumi, PNI, Perkindo, Partai Katholik, PSII dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai, yaitu Sultan Hamengkubhuono ke IX dan Ir. Juanda. Meskipun kabinet sudah diganti ternyata suasana di dalam negeri semakin bertambah ke-ruh dengan timbulnya Pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948 yang dapat dipadamkan oleh Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Oktober 1948. Belanda melihat kesempatan ini, maka dengan segera mengadakan agresinya yang kedua sehingga jatuhlah ibukota Yogyakarta.

7.2 Perpecahan di Kalangan Partai Sarekat Islam Indonesia dan Masyumi

Partai Sarekat Islam Indonesia adalah kesinambungan dari Sarekat Dagang Islam, yaitu sebuah organisasi politik yang didirikan pada masa kebangkitan nasional. Partai Sarekat Islam Indonesia adalah partai Islam yang pertama kali di bumi Indonesia.

Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan berbagai pengalaman sejarahnya, dan pasang surut perkembangannya, tetap berjalan sampai pada masa penjajahan Jepang. Di situlah Partai Sarekat Islam Indonesia difusikan dengan partai-partai Islam lainnya, menjadi Masyumi.

Agaknya dalam tubuh Masyumi pun tidak terdapat kesatuan kata, bahasa dan pendapat, karena memang terdapat perbedaan pandangan tentang dasar negara. Inilah titik tolak pertama perbedaan pendapat antara Partai Sarekat Islam Indonesia dengan Masyumi. Sebab Partai Sarekat Islam Indonesia ini tidak menghendaki negara Islam, dan tidak menyetujui adanya perpecahan di kalangan umat Islam Indonesia.

Sejak tanggal 11 September 1947 Kabinet Syarifudin yang mula-mula merupakan kabinet nasional berubah menjadi kabinet koalisi dan partai Masyumi mendapat kursi lima jumlahnya yaitu sebagai :

- a. Wakil Perdana Menteri Pertama, diduduki oleh Mr. Syamsudin.
- b. Menteri Dalam Negeri, diduduki oleh Mr. Moh. Roem.
- c. Menteri Agama diduduki oleh Kyai Haji Mansur.
- d. Mr. Kasman Singodimejo, menjabat Menteri Muda Kehakiman.
- e. Sedangkan golongan Partai Sarekat Islam Indonesia, yang pada waktu itu masih bergabung dalam Masyumi, disertai kedudukan Menteri Negara yang dipercayakan kepada Anwar Tjokrominoto.

Sepintas lalu dengan masuknya Partai Masyumi dalam Kabinet Amir Syarifudin seolah-olah dapat memperkuat kedudukan kabinet, tetapi ternyata hal itu keliru dengan adanya pengumuman Dewan Pusat Masyumi tertanggal 16 Januari 1948, yang menuntut agar kabinet diubah dan diganti dengan **national zaken Kabinet**. Apakah sebabnya Masyumi mengambil tindakan itu. hal ini dapat diungkapkan bila setelah peristiwa usul Natal KTN. Kecuali mengusulkan prosedur pembentukan Negara Indonesia Serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan, KTN juga menyumbangkan pikiran dalam soal gencatan senjata. Usul KTN itu bisa disebut Natal KTN. Usul ini diterima oleh Republik Indonesia tetapi ditolak oleh Belanda.

Dalam usul ini RI mendapat keuntungan sebab di situ dinyatakan bahwa pasukan Belanda harus ditarik mundur sampai kedudukan Belanda pada tanggal 20 Juni 1947. Dengan demikian berarti Proklamasi Belanda tanggal 29 Agustus 1947 tidak diakui. Karena usul Natal ini ditolak oleh Belanda, maka Masyumi menarik menteri-menterinya dari Kabinet Amir Syarifudin. Sebenarnya baik RI maupun Masyumi menolak usul Belanda itu, tetapi Masyumi sendiri tidak segera menyampaikan penolakan itu kepada KTN. Inilah salah satu bukti keraguan Delegasi Indonesia. Malahan pada tanggal 18 Januari 1948 PNI sendiri menolak Persetujuan Renville dan menuntut pembubaran kabinet. Mundurnya Masyumi dari kabinet membuktikan

kan keragu-raguan sikapnya dan inilah titik mula yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara Partai Sarikat Islam Indonesia dan Masyumi. Di sini jelas akibat Perjanjian Renville, Masyumi telah retak. Haji Agus Salim tetap berada di PSSI, meskipun dalam ulasannya, tokoh-tokoh Masyumi menyatakan, bahwa Haji Agus Salim telah meninggalkan PSII. Ternyata ulasan tokoh-tokoh Masyumi itu tidak tepat.

Sebenarnya sesudah Indonesia Merdeka Agus Salim memasuki Partai Politik Islam Masyumi. Pada waktu itu seluruh partai politik dan organisasi Islam bersatu di dalam Masyumi. Persatuan umat Islam ini sesuai dengan cita-cita Haji Agus Salim. Itulah yang menyebabkan dia masuk Masyumi. Di dalam kongres Masyumi yang I di Yogyakarta, Haji Agus Salim ingin agar persatuan seluruh umat Islam diikrarkan. Seluruh organisasi Islam lalu lebar dalam Masyumi dan dibentuklah pengurus pusat yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka, seperti Haji Agus Salim, Mohamad Roem, sangaji (Pergerakan Penyedar), Abikusno, Aruji Kartawinata, Harsono Tjokroaminoto, Anwar Tjokroaminoto (Partai Sarekat Islam Indonesia), dr. Sukiman, Wiwoho, Za. Achmad (partai Islam Indonesia). Di samping itu perkumpulan sosial seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama menggabungkan diri dalam Masyumi. Namun pada 1947 timbul perpecahan antara Masyumi dengan Partai Sarekat Islam Indonesia. Waktu itu Haji Agus Salim memang sedang bertugas ke luar Negeri. Akibatnya perpecahan antara Partai Sarekat Islam Indonesia dan Masyumi tidak dapat dihindari. Inilah yang menyebabkan Haji Agus Salim merasa masgul dan kecewa, sehingga terpaksa menarik diri dari Masyumi.

Kabinet Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Sayap kiri atau Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Pesindo, Partai Sosialis, partai Buruh Indonesia PKI tidak diikuti-sertakan dalam Kabinet Hatta ini. Benar-benar merupakan suatu romantika sejarah. Sebetulnya persetujuan Renville

diciptakan oleh sayap kiri. Masyumi yang menolak Persetujuan Renville ternyata ditugaskan melaksanakan persetujuan itu. Sikap kurang tegas dari Masyumi ini yang dinilai oleh PSII tidak tepat, menjadi alasan pokok mengapa Partai Sarekat Islam Indonesia melepaskan diri dari Masyumi. Haji Agus Salim menunjukkan kepribadiannya yang selalu menghendaki persatuan dan kesatuan serta rasa tanggung jawab untuk mempertahankan Negara, Nusa dan Bangsa serta loyal pada pemerintahnya.

7.3 *Perundingan Konperensi Meja Bundar*

Akibat agresi militer Belanda yang pertama yang ditutup dengan Persetujuan Renville, maka wilayah Republik Indonesia menjadi sempit lagi. Pengakuan *de facto* atas Sumatra, Jawa dan Madura seperti yang tercantum dalam Persetujuan Linggajati merupakan khayalan belaka. Blokade Belanda yang sangat kuat menambah kesulitan dalam kehidupan perekonomian rakyat. Peristiwa Madiun menambah kemelaratan rakyat yang sudah tidak tertahan lagi. Persediaan padi dan bibit habis dibakar. Perekonomian rakyat morat-marit dan masyarakat Indonesia terpecah belah dalam pelbagai golongan yang saling membenci. Perpecahan itu menimbulkan kerugian nasional dalam perjuangan menghadapi lawan dan merupakan kerugian sosial karena golongan-golongan yang ada saling bertentangan.

Tenaga yang saling bertentangan demi mempertahankan golongan dan ideologinya perlu dipersatukan kembali. Wilayah Indonesia tidak hanya seluas wilayah Republik ala Persetujuan Renville, tetapi seharusnya benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah di luar Republik Indonesia dikuasai oleh tentara Belanda dengan kekuatan senjata sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak mampu untuk mengusir tentara penjajah itu. Akibatnya satu-satunya jalan yang harus ditempuh ialah melanjutkan dan memenangkan perundingan dengan pihak Belanda. Belanda tahu benar-benar tentang hal ini,

karena itu pada tanggal 11 Desember 1948 Belanda mengeluarkan maklumat resmi yang isinya menuntut agar Republik Indonesia mengubah sikapnya yang secara radikal dan mengabaikan semua tuntutan pihak Belanda.

Fihak Belanda pada awalnya bermaksud membentuk Negara Indonesia Serikat tanpa Republik Indonesia tetapi agaknya daerah-daerah di luar Republik para pemimpinnya sudah sibuk mengadakan perundingan mengenai pemerintah federal sementara. Dalam usaha membentuk pemerintahan itu negara Indonesia Timur memegang peranan penting, terutama semenjak terbentuknya Kabinet Anak Agung Gede Agung. Manifest Politik-nya menyebutkan antara lain mengusahakan persatuan seluruh Nusa bangsa Indonesia. Kesibukan dalam pembentukan pemerintahan Indonesia Serikat sementara belum sampai berhasil, maka tiba-tiba pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melaksanakan agresi militer yang kedua. Akibat ini Kabinet Anak Agung Gede Agung sebagai protes terhadap tindakan Belanda itu menyerahkan mandatnya kepada Presiden Negara Indonesia Timur.

Serangan Belanda secara mendadak berhasil menduduki pangkalan udara Maguwo. Pendaratan tentara payung di pangkalan udara Maguwo tidak mengalami perlawanan yang berarti. Pendaratan itu dilakukan jam 02.00 malam hari. Perjalanan menuju ke kota Yogyakarta juga hanya mengalami perlawanan kecil-kecilan, hal ini disebabkan karena Tentara Republik Indonesia sengaja mengundurkan diri ke luar kota. Pada jam 16.00 kota Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda. Tentara Republik Indonesia mengundurkan diri dari kota, bersiap-siap untuk melakukan perang gerilya. Pada waktu itu para pemimpin Republik Indonesia yang berada di kota Yogyakarta sedang membicarakan situasi politik, di Istana Presiden. Diputuskan dalam sidang itu untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra yang akan dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara, yaitu Manteri Kemakmuran yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatra.

Mandat Presiden kepada Mr. Safruddin itu ditanda-tangani oleh Dwi Tunggal Sukarno—Hatta. Di antara bunyi mandat itu sebagai berikut : "Kami Presiden Republik Indonesia memberikan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah menyerang ibukota. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka kami menugaskan dan menguasai kepada Mr. Safrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatra."

Dikawatkan pula pada dr. Sudarsono, Palar dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India, bila ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatra tidak berhasil. Instruksi ini ditanda-tangani oleh Presiden sendiri dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Semua pemimpin yang berada di Istana Negara ditawan oleh pemerintah Belanda. Panglima Besar Jendral Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk meneruskan perang gerilya. Menteri-menteri Susanto Tritoprojo, IJ. Kasimo dan Lukman Hakim berhasil meloloskan diri dan ikut serta dalam melaksanakan perang gerilya. Sebagian pemimpin-pemimpin yang lain menyerahkan diri dengan tujuan untuk dapat selalu berhubungan dengan Komisi Tiga Negara, sehingga perjuangan politik dan perjuangan fisik dapat dilaksanakan. Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri ditawan di Prapat kemudian dipindahkan ke Bangka. Sedangkan wakil Presiden Mohamad Hatta, Mr. Moh. Roem, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Asaat dan Suryadharma diasingkan ke Bangka.

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin RI segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci, sehingga ter-

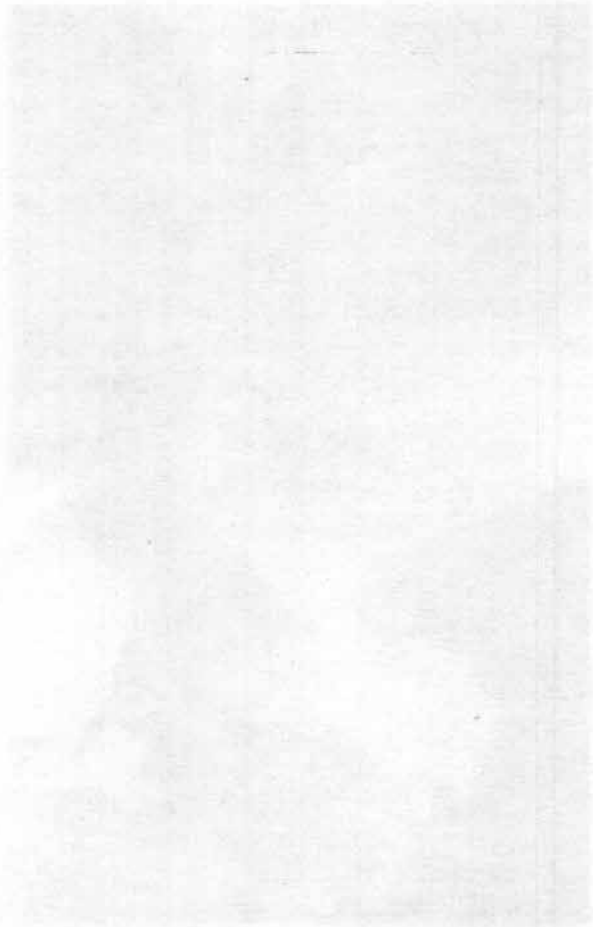
paksa wakil Belanda menyerah, tetapi tetap menghindarkan pelaksanaan resolusi itu. Sebelum Dewan keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 28 Januari 1949, Perdana menteri Nehru dari India berhasil mengadakan konprensi yang dihadiri oleh 21 negara dan konprensi itu terkenal dengan nama Konprensi New Delhi. Isi konperensi itu sangat menguntungkan Indonesia. Karena desakan-desakan dari Dewan Keamanan dan opini dari negara-negara Islam di Timur Tengah serta Konperensi New Delhi terpaksa Belanda mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia yang apda akhirnya lahir lah Persetujuan Roem-Royen itulah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta dan pada tanggal 30 Juni 1949 adalah hari bahagia bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.

Setelah Konperensi antar Indonesia maka pada tanggal 23 Agustus 1949 lahir lah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Delegasi Indonesia yang diketahui oleh Mohamad Hatta termasuk di antaranya Haji Agus Salim. Konperensi Meja Bundar adalah konperensi segi tiga antara Delegasi Belanda, Republik Indonesia dan BFO, di bawah pengawasan Komisi PBB. Karena BFO dan Republik Indonesia telah bersatu maka Belanda kini hanya menghadapi Delegasi Indonesia.

Pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditanda-tangani piagam persetujuan tentang Konstitusi RIS dan pada tanggal 16 Desember 1949 dilangsungkan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta yang dilakukan oleh wakil-wakil dari 16 Negara Bagian. Pilihan jatuh pada Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

Dalam periode KMB ini Haji Agus Salim tetap menunjukkan sikapnya sebagai putra pertiwi yang tidak goyah pendiriannya demi membela keagungan Nusa dan bangsa. Meskipun nantinya

karena fisiknya sudah lemah tidak lagi menjadi Menteri Luar Negeri, namun jasa-jasa baiknya tetap dibutuhkan oleh Negara Republik Indonesia, terutama bagi kepentingan hubungan luar negeri.





Haji Agus Salim duduk di tengah antara Prof. G.Mc. Turnan Kahin dan Dr. John Echols. Beliau berada di Cornell University sebagai Dosen Tamu. Kahin terkenal dengan bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia*” sedang John Echols karena kamusnya.

BAB VIII PENGABDIAN DI HARI TUA

Seseorang ada kalanya mengalami masa jaya dan pada suatu ketika juga akan mengalami masa kemunduran. Kalau dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1950, Haji Agus Salim laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelar "Orang Tua Besar" (*The Grand Old Man*), namun sesudah itu peranan Haji Agus Salim mulai memudar.

Sejak ditawan di Brastagi mulailah Haji Agus Salim mengisi waktunya yang terluang dengan mengarang sebuah buku yang berjudul "Bagaimana Takdir, Tawakal dan Taukhid harus dipahami?" Agaknya buku ini pada tahun 1953 diperbaiki menjadi "Keterangan Filsafat tentang Taukhid Takdir dan Tawakal". Juga pada tahun itu beliau mengeluarkan sebuah buku dengan judul *Kebudayaan*.

Meskipun demikian beliau masih tetap diharapkan jasa-jasanya bagi negara, karena itu sejak tahun 1950 Haji Agus Salim diangkat menjadi Penasehat Menteri Luar Negeri sampai pada saat wafatnya. Pada tahun 1952 beliau mendapat undangan untuk memberikan kuliah tentang Islam pada *Cornell University* di Ithaca, Amerika Serikat. Baru pada tanggal 17 Januari 1953 beliau mulai memberi kuliah, kecuali di *Cornell University* juga di *Prinstone University*. Pada waktu itulah beliau berkesempatan lebih memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu.

Antara lain kuliah Haji Agus Salim di luar negeri itu mengenai sejarah hidupnya terutama yang berhubungan dengan asal mulanya ia memeluk Islam sebagai tradisi yang telah ada pada keluarganya, di daerah Minangkabau yang terkenal dengan alam keagamaan yang kuat. Akibatnya beliau sangat tertarik untuk mempelajari agama Islam dari berbagai segi, tidak hanya Islam sebagai agama dan anutan nenek moyangnya, melainkan Islam sebagai pandangan hidup setiap pribadi muslim yang sadar akan tugas dan kewajibannya di tengah-tengah masyarakat bangsanya. Semakin dalam beliau menyelidiki Islam, semakin tertambat hatinya untuk tetap hidup dan berjuang demi kepentingan serta keluhuran Islam. Akhirnya beliau bertetap hati untuk berjuang dalam kalangan Islam. Berjuang demi bangsa dan agama. Sebagai hasil ijtihad yang dipelopornya, pandangannya terhadap berbagai masalah agama bercorak tersendiri. Sebagai orang yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Islam, tapi hanya karena warisan dari nenek moyangnya, juga pengaruh dari keluarganya ditambah dengan hasil pendidikan yang diperolehnya dan pengaruh dari alam masyarakat sekelilingnya; kesemuanya ini mengantarkan Haji Agus Salim untuk menjadi manusia yang berfikir terhadap apa yang dilihat serta yang dialaminya. Berfikir terhadap keadaan sekelilingnya. Pertanyaan-pertanyaan maka senantiasa timbul dalam pikirannya, yang menyebabkan beliau mulai menyelidiki, mengkaji segala ajaran dan isi Al Qur'an. Hasilnya menimbulkan pandangan-pandangan baru dalam kalangan masyarakatnya yang sebelumnya belum pernah dikenal. Tidak berhenti sampai di situ saja, beliau terus-menerus menyelidiki Al Qur'an dan memperbandingkannya ajaran-ajaran Islam dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dunia Barat, hingga lahirlah suatu kesimpulan bahwa umat Islam Indonesia mundur lantaran salah dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam. Di kalangan umat Islam beliau tidak hanya sebagai ulama melainkan juga muncul sebagai salah seorang ahli pikir Islam dalam abad ini. Beliau juga tampil di depan dan terjun di tengah-tengah pergerakan Islam untuk memberi pim-

pinan dan bimbingan secara langsung. Haji Agus Salim tidak hanya mengemukakan teori atau pun pandangan baru mengenai soal keislaman, melainkan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Haji Agus Salim disebabkan mendapat pendidikan Barat hampir saja tidak mengenal lagi agama nenek moyangnya. Tetapi dengan ditugaskannya ke tanah suci menyebabkan beliau kembali ke agamanya.

Lima tahun lamanya bermukim di tanah arab yang membawa beliau kembali ke alam keislaman, yang selama ini hampir hilang ditelan oleh pendidikan Barat. Haji Agus Salim menemukan diri pribadinya ketika gelar haji telah menghiasi namanya dalam usia yang semakin lanjut, ketika Al Qur'an telah berbicara kepadanya di kala kitab suci itu dibuka dan dibolak-baliknya, yaitu ketika empat bahasa dunia yang dikenalnya telah menjadi lima dengan bahasa Arab, yang secara tersambil di pelajarinya sebagai pegawai yang membawanya berlarut-larut di Arabia. Di waktu itulah Haji Agus Salim mendapati pintu telah terbuka baginya yang mempertemukannya dengan jalan yang menghubungkannya dan membawanya sampai kepada Tuhan. Akhirnya haji Agus Salim lahir sebagai reformer Islam di tanah airnya, mengikuti jejak para reformer Islam, seperti Jamaluddin Al Afghani, Mohammad Abduh di Mesir yang telah mendahului-nya.

Pada tahun itu juga Haji Agus Salim mendapat tugas dari Presiden Sukarno bersama dengan Sri Paku Alam dan Duta Besar Republik Indonesia di Inggris untuk mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri upacara penobatan Ratu Elizabeth II, kejadian ini tercatat pada tanggal 3 Juni 1953. Dalam upacara penobatan tadi seperti halnya tamu-tamu agung yang lain, Haji Agus Salimpun tidak ketinggalan menghisap rokok yaitu rokok kretek. Seketika Haji Agus Salim berhadapan dengan Pangeran *Duke of Endinburgh*, suami Ratu Elizabeth. Suami sang ratu membahu-sesuatu yang tidak sedap. Maka Pangeran itu pun bertanya kepada para hadirin, dari manakah bau yang tidak

sedap itu datangnya ? Maka Haji Agus Salim pun menjawablah, "Yang Mulia, bau yang tidak sedap itu adalah bau rokok kretek yang sedang saya hisap yang dibuat dari tembakau dan cengkih. Boleh saja Yang Mulia tidak menyukainya. Tapi justru bau inilah yang menarik minat pelaut-pelaut Eropa datang ke negeri kami tiga abad yang lalu." Jawab Haji Agus Salim ini tepat mengenai sasaran yang menyebabkan *Duke of Edinburg* tidak dapat berkutik lagi.

Sehabis menyelesaikan tugas misinya ini, beliau masih kembali lagi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan memberi kuliah di sana dan baru pada pertengahan tahun 1954 Haji Agus Salim kembali ke Indonesia. Ternyata meskipun beliau menjadi guru besar di perguruan tinggi di luar negeri, tetapi beliau tetap menjadi penasehat Menteri Luar Negeri.

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta pada bulan Nopember 1953 meminta agar Haji Agus Salim menjadi dosen tetap di sana. Direncanakan setahun kemudian pada bulan Nopember beliau melaksanakan tugasnya sebagai guru besar di PTAIN Yogyakarta untuk memberikan kuliah dalam mata pelajaran tentang dakwah. Untuk menghadapi pekerjaan yang baru itu beliau telah mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya sebagai penasehat utama pada Kementerian Luar Negeri, tetapi permohonannya itu ditolak oleh Menteri Luar Negeri Sunario yang mengatakan bahwa meskipun beliau sudah mengajar di PTAIN Yogyakarta, sehingga tidak dapat aktif lagi pada Kementerian Luar Negeri, namun permintaan berhentinya tidak akan dipenuhi.

Pada tanggal 8 Oktober 1954 Haji Agus Salim merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke tujuh puluh bersama keluarga dan handai taulan. Sebuah panitia khusus yang terdiri dari Mohammad Roem S.H., S. Soerowijono, Mohammad Sardjan, Mohammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara SH, Prawoto Mangkusamito, Yoesoef Wibisono SH, Soedjono Hardjosoediro SH dan M. Zain Djambek, telah dibentuk untuk merayakan hari Ulang Tahun itu. Panitia itu menyusun sebuah buku tebal berisi ke-

nang-kenangan Haji Agus Salim. Buku itu diberi nama "Jejak Langkah Haji Agus Salim" dan selesai dicetak tepat pada hari Ulang Tahun itu. Jadi Haji Agus Salim sempat membaca buku tadi. Pada perayaan itulah dinyatakan oleh Haji Agus Salim bahwa beliau akan meninggalkan jabatan pemerintahan dan akan mencurahkan tenaga dan fikiran bagi lapangan pendidikan dan pengajaran.

Manusia punya rencana, tetapi Tuhanlah Maha Penentu. Pada tanggal 4 Nopember 1954 jam 14.42, Haji Agus Salim wafat di Rumah Sakit Umum Jakarta. Orang tua yang berumur 70 tahun ini selama 50 tahun mencurahkan tenaganya demi kepentingan nusa dan agama. Keesokan harinya jam 14.00 jenazah Haji Agus Salim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemakamannya dilakukan dengan upacara kenegaraan, dengan inspektur upacara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Selesai pemakaman Perdana Menteri Republik Indonesia memberikan sambutan, yang diteruskan dengan sambutan dari Duta Besar Pakistan yang bertindak nama *Corps Diplomatique*, yang antara lain mengatakan Haji Agus Salim karena kualitas dan ilmu pengetahuannya yang luhur mengakibatkan tidak hanya mempunyai reputasi di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Almarhum adalah seorang pemimpin besar di dunia yang mampu memeperlihatkan kelebihanannya pada sifat-sifatnya serta personalitasnya. Haji Agus Salim bukanlah hanya kepunyaan Indonesia melainkan juga milik dari seluruh dunia.

Selain di gedung DPR, di Kementerian Luar Negeri dan di Kabinèt Perdana Menteri juga dilaksanakan upacara bela sungkawa atas wafatnya Haji Agus Salim. Berpuluh-puluh tokoh maupun organisasi-organisasi mengirimkan surat bela sungkawa terhadap wafatnya Haji Agus Salim. Untuk menghormati jasa Haji Agus Salim, maka jalan Gereja Theresia tempat tinggal Haji Agus Salim hingga wafatnya, ditambah dengan jalan Sabang diganti namanya menjadi jalan Haji Agus Salim.

Kalau harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan nama. Jasa dan amalan Haji Agus Salim berlimpah-limpah dicurahkan bagi kepentingan nusa, bangsa dan negara. Jasanya tidak dapat terlupakan bagi bangsa Indonesia sepanjang masa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Gani, Roeslan, **Api Revolusi tetas berkobar**, Pradnya paramita, Djakarta, 1963.
- , **Asia Tenggara dalam Sinar Apinya Hari Panlawan Indonesia**, Pradnyaparamita, Djakarta, 1964.
- , **Penggunaan Ilmu Sejarah**, Prapantja, Djakarta, 1964.
- , **Almarhum Dr, Soetomo yang saya kenal**, Idayu. Jakarta, 1976.
- Adam Malik, **Riwayat Proklamasi**, Wijaya, Jakarta, 1962.
- Agus Salim, H. **Riwayat kedatangan Islam di Indonesia**, Tintamas, Jakarta, 1962.
- , **Islam, Wasiat Tuhan yang terakhir**, Sumber Ilmu, Jakarta, n.d.
- Ali Sastroamijoyo, **Tonggak-tonggak di perjalananku**, Kinta, Jakarta, 1974.
- Asisten Kjpala Pusat Sejarah Militer, **Pengantar Sejarah Militer**, 1959.
- Cindy Adams, **Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1966.
- Dahm, Bernhard, **Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence**, Cornell University, Ithaca, New York, 1969.

- Dhaniswara, **Dokumentasi Sewindu**, Cornell University, Ithaca, New York, 1953.
- Gottschalk, Louis,
- Gottschalk, Louis, **Mengerti Sejarah**, Bhratara, Jakarta, 1975.
- Hatta Mohamad, **Permulaan Pergerakan Nasional**, Idayu, Jakarta 1977.
- , **Sekitar Proklamasi**, Tintamas, Jakarta, 1969.
- , **Indonesia Merdeka**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Kasman Singodimejo, **Renungan dari Tahanan**, Tintamas, Jakarta, 1967.
- Kementerian Penerangan RI, **Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945-1949**, Kempen, RI, Jakarta, 1949.
- , **Kabinet - kabinet RI**, Kempen RI, 1958.
- Nugroho Notosusanto, **Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer**, Idayu, Jakarta, 1978.
- Pranata, SPP., **Ki Hajar Dewantoro**, Balai Pustaka, Jakarta, 195p
- Pringgodigdo. AK, **Perjuangan bangsa Indonesia menegakkan Pancasila dalam Santiaji Pancasila**, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1975.
- , **Sejarah Pegerakan Rakyat Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 1970.
- Roeder, O.G. **Suharto dari Prajurit sampai Presiden**, Gunung Agung, Jakarta, 1969.
- Solichin, **Haji Agus Salim hidup dan Perjuangannya**, Salam, Solichin, **Haji Agus Salim hidup dan Perjuangannya**, Jayamurni, Jakarta, 1961.
- Sartono Kartodirdjo, et al, **Sejarah Nasional Indonesia V**, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Slamet Muljono, **Nasionalisme sebagai modal Perjuangan Bangsa I dan II**, Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
- Sutrisno Kutoyo, et al, **Haji Agus Salim Riwayat Hidup dan Perjuangannya**, Angkasa, Bandung, nd.
- , **K.H. Ahmad Dahlan Riwayat Hidup dan Perjuangannya**, Angkasa, Bandung, n.d.

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

93

Syafruddin Prawiranegara, Islam dilihat dengan Kaca Mata Modern, Idayu, Jakarta, 1975.

---, Sejarah sebagai Pedoman untuk Membangun Masa Depan, Idayu, Jakarta, 1976.

Tjiptoning, "Apa dan Siapa", Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 1951.

Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim, Jejak dan Langkah Haji Agus Salim, Tintamas, Jakarta, 1954.

